



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan/program kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 menetapkan dua sasaran dan empat indikator kinerja kegiatan. BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi target kinerja sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024.

Meskipun telah berhasil mencapai target kinerja, namun masih terdapat beberapa tantangan, diantaranya masih perlu mereformulasi strategi dan inovasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan, namun tentunya tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang dicapai oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan referensi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan, serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap ikhtiar dan upaya kita dalam membangun dunia Pendidikan yang bermutu untuk semua.

Indralaya, 30 Januari 2025
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan,

Aria Alimud Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP 19751125 2007011 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan capaian 2 sasaran kegiatan (SK) dengan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Tingkat ketercapaian SK 1 dan 2 dan IKK 1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2 secara komprehensif diuraikan pada tabel berikut.

SK dan IKK	Target, Realisasi, Capaian Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan						
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Target Renstra	-	-	0.90	1.96	3.92
	Target PK	-	-	0.90	1.96	3.92
	Realisasi	-	-	3.93	2.91	4.61
	Capaian Kinerja	-	-	401.02%	140.47%	117.60%
IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Target Renstra	-	-	25	30	35
	Target PK	-	-	25	30	35
	Realisasi	-	-	100	33.33	100
	Capaian Kinerja	-	-	400%	111.10%	205.71%
SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel						
IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target Renstra	BB	A	A	A	A
	Target PK	BB	A	A	A	A
	Realisasi	BB	BB	A	A	A
	Capaian Kinerja	100%	03,33%	100%	100%	100%
IKK2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target Renstra	01	02	03	04	05
	Target PK	01	02	03	04	94
	Realisasi	09.95	02.01	97.54	93.49	97.65
	Capaian Kinerja	111.05%	100.99%	117.52%	111.30%	103.00%

Secara umum, capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut.



Kendala dan tantangan yang ditemui dalam upaya pencapaian target kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Kolaborasi dan sinergitas keterlibatan mitra pembangunan dan komunitas dalam Implementasi program prioritas pendidikan masih harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
2. Koordinasi dan sinergitas pelibatan pemangku kepentingan (Tata Pemerintahan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam upaya pemenuhan SPM pendidikan dan penyusunan perencanaan serta penganggaran masih perlu lebih diselaraskan dan diperkuat.
3. Advokasi program-program prioritas pada stakeholder/ekosistem pendidikan masih perlu terus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan capaian program.
4. Koordinasi dengan Tim PMO Transformasi Pembelajaran dan Tata Kelola Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota masih perlu diperkuat untuk mendapatkan capaian kinerja program dan kegiatan yang lebih baik di masa mendatang.
5. Strategi dan mekanisme dalam identifikasi dan inventarisasi, inovasi dan praktik baik yang dilakukan ekosistem pendidikan perlu dipetakan serta dikaji agar dapat lebih berdampak dan menjadi inspirasi bagi peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.
6. Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola administrasi satuan pendidikan yang sudah baik perlu semakin ditingkatkan dengan pelibatan dan partisipasi seluruh ekosistem pendidikan.
7. Partisipasi pemangku kepentingan dalam mengikuti pendampingan implementasi program-program prioritas melalui inovasi Pendampingan Melekat Bimbingan Dalam Jaringan (PIKAT BIDAR), dan Advokasi secara berkala dan berkelanjutan diperkuat dan ditingkatkan.
8. Perlunya lebih memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan dan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan program prioritas kementerian.
9. Masih perlu aktivitas internal lembaga bagi pegawai seperti Rapat Rutin (Patin), Senin Berpijar, dan Komunitas Belajar Cerdas Pegawai yang lebih inovatif dan konsisten sehingga menjadi budaya organisasi.

10. Penguatan budaya belajar pegawai melalui Komunitas Belajar (kombel) internal pegawai telah dilaksanakan namun masih memerlukan penguatan dan komitmen seluruh pegawai untuk konsisten melaksanakan kombel secara efektif dan membudaya agar lebih berdampak dan berkelanjutan.
11. Publikasi dan komunikasi hasil kinerja satuan kerja masih perlu diintensifkan dan diamplifikasi untuk memperluas target sasaran pada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
12. Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas wilayah Bebas Korupsi masih perlu diperkuat secara berkelanjutan, berdampak dan menjadi budaya kerja.

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Konsensus/kesepakatan bersama pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi dan sinergitas implementasi program prioritas.
2. Penguatan partisipasi pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan dan penyusunan perencanaan serta penganggaran peningkatan mutu pendidikan melalui penyalarsan program peningkatan mutu pendidikan.
3. Koordinasi dan sinergi dengan Tim PMO Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dan merefleksikan capaian kinerja program dan kegiatan yang lebih optimal, berdampak dan berkelanjutan di masa mendatang
4. Mengidentifikasi dan menginventarisasi strategi dan mekanisme penjangkaran inovasi dan praktik baik dengan mengedepankan kemandirian dan inisiasi dalam ekosistem pendidikan (Pemda, Dinas pendidikan, Satuan Pendidikan, PTK)
5. Optimalisasi peran mitra pembangunan/komunitas/ekosistem pendidikan untuk mewujudkan tata kelola administrasi satuan pendidikan yang lebih baik dalam mengimplementasikan program prioritas
6. Penguatan sinergi hubungan dengan media (media relationship) dalam rangka komunikasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Optimalisasi komunitas belajar internal untuk menguatkan keberhasilan transformasi sumber daya manusia (SDM) unit pelaksana teknis (UPT) satuan kerja dan kualitas capaian kinerja program prioritas agar lebih terstruktur dan terjadwal.
8. Penguatan partisipasi dan kolaborasi pegawai antar tim kerja menjadi budaya kerja.
9. Optimalisasi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dalam Penguatan Reformasi Birokrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	4
D. Isu-isu Strategis	6
E. Peran Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Matriks Kinerja	10
B. Program Prioritas	12
C. Rencana Kerja dan Anggaran.....	21
D. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	25
B. Capaian Anggaran	52
C. Kinerja Lain-Lain	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Kendala dan Tantangan	79
C. Langkah Kerja Ke Depan	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan	2
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan	10
Tabel 2.2	Matriks Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	10
Tabel 2.3	Matriks Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	11
Tabel 2.4	Program Prioritas BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	13
Tabel 2.5	Perbandingan Anggaran Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.6	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	22
Tabel 2.7	Matriks Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2020-2021	23
Tabel 2.8	Matriks Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2022-2024.....	24
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 3.2	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 3.3	Data Akreditasi Satuan PAUD DIKMAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024	30
Tabel 3.4	Hasil Perhitungan IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	30
Tabel 3.5	Perhitungan Nilai IKK 1.2 Berdasarkan Kenaikan Mutu Pembelajaran Prov/Kab/Kota Tahun 2023 dan 2024.....	37
Tabel 3.6	Predikat dan Intepretasi Nilai SAKIP.....	46
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	52
Tabel 3.8	Program Crosscutting/Collaborative BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan	5
Gambar 1.2	Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan	6
Gambar 3.1	Trend Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024	27
Gambar 3.2	Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	28
Gambar 3.3	Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.1 Tahun 2022, 2023, dan 2024	30
Gambar 3.4	Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2022, 2023, dan 2024	31
Gambar 3.5	Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 Tahun 2022, 2023, dan 2024	37
Gambar 3.6	Perbandingan Capaian IKK 1.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024	39
Gambar 3.7	Perbandingan Capaian IKK 2.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024	47
Gambar 3.8	Tingkat Implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	47
Gambar 3.9	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	51
Gambar 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024	51

BAB I | PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan satuan kerja/unit pelaksana teknis di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Pada awal berdirinya, BPMP Provinsi Sumatera Selatan dikenal dengan nama Balai Penataran Guru (BPG) Palembang. BPG Palembang mulai beroperasi pada tanggal 21 Januari 1984 dan diresmikan pada tanggal 3 Februari 1987 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Republik Indonesia, Bambang Triantoro. Dalam perkembangannya, BPG Palembang mengalami beberapa kali perubahan baik terkait nomenklatur maupun tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Perubahan nomenklatur pertama, BPG Palembang berubah menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2007 dilakukan perubahan untuk kedua kali dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan demikian, sejak tahun 2007 nomenklatur lembaga ini menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, nomenklatur Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Dinamika regulasi terakhir yaitu berdasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan berubah nomenklatur menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Sejak Oktober 2022 BPMP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si. BPMP Provinsi Sumatera Selatan mempunyai wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 13 kabupaten dan 4 kota.

Secara keseluruhan jumlah pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2024 yaitu sebanyak 108 orang. Komposisi pegawai ini terdiri atas 71 orang PNS dan 37 orang PPNP/Non PNS, seperti tersaji pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Keadaan	Jumlah	Keterangan
Status Kepegawaian:		
PNS	71 orang	
PPNP/Non PNS	37 orang	
PNS berdasarkan Status Jabatan:		
Pimpinan Eselon III	1 orang	
Pimpinan Eselon IV	1 orang	
Jabatan Pelaksana	55 orang	
Jabatan Fungsional	15 orang	12 Widyaprada 2 perawat 1 pustakawan
PNS berdasarkan Status Pendidikan:		
Doktor/S3	1 orang	
Magister/S2	30 orang	
Sarjana/S1	28 orang	
Sarjana Muda/Diploma	2 orang	
SMA	6 orang	
SMP	4 orang	
Jumlah	71 orang	
PNS berdasarkan Status Kepangkatan:		
Golongan IV	28 orang	
Golongan III	35 orang	
Golongan II	5 orang	
Golongan I	3 orang	

Keadaan	Jumlah	Keterangan
Jumlah	71 orang	
PNS berdasarkan Jenis Kelamin:		
Laki-laki	49 orang	
Perempuan	22 orang	
Jumlah	71 orang	

Sumber: Data Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Desember 2024



B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319).

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

C.1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

C.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022, BPMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

C.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 11 Tahun 2022, struktur organisasi BPMP terdiri atas 1 orang administrator yaitu kepala dan 1 orang pengawas yaitu Kepala Subbagian Umum serta kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan tercantum pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan

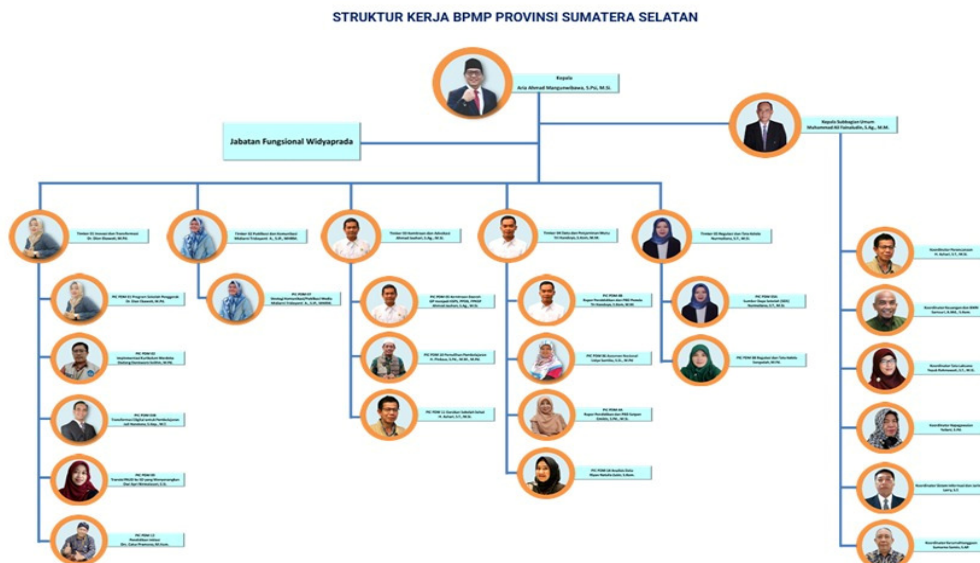
Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas BPMP Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk optimalisasi capaian kinerja organisasi serta penyelarasan dengan unit kerja pusat, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan transformasi struktur kerja dari kelompok kerja menjadi tim kerja dan didukung oleh Sub Bagian Umum. Tim kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

- a. Tim Kerja 01: Inovasi dan Transformasi
- b. Tim Kerja 02: Publikasi dan Komunikasi
- c. Tim Kerja 03: Kemitraan dan Advokasi
- d. Tim Kerja 04: Data dan Penjaminan Mutu
- e. Tim Kerja 05: Regulasi dan Tata Kelola

Pada masing-masing tim kerja ditetapkan seorang ketua tim kerja dan beberapa penanggungjawab/*Person In Charge* (PIC) program prioritas serta anggota tim kerja. Sedangkan Sub bagian umum terdiri dari 6 urusan yang dikoordinir oleh seorang koordinator urusan terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan
- b. Urusan Keuangan dan BMN
- c. Urusan Tata Laksana
- d. Urusan Kepegawaian
- e. Urusan Sistem Jaringan
- f. Urusan Kerumahtanggaan

Struktur tim kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2 Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan

D. Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan atau isu strategis. Tantangan dan isu strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan, antara lain sebagai berikut.

D.1 Isu Strategis Eksternal

Beberapa permasalahan/isu strategis eksternal yang menjadi perhatian antara lain:

- a. Perubahan regulasi terkait dengan penjaminan mutu pendidikan.

- b. Peningkatan kualitas transformasi satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak
- c. Optimalisasi implementasi Kurikulum Merdeka di semua satuan pendidikan
- d. Optimalisasi pemanfaatan ARKAS 4 pada penerima BOSP
- e. Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan transformasi digital untuk pembelajaran secara inovatif, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya
- f. Penambahan daya tampung yang sesuai dengan juknis PPDB
- g. Optimalisasi penerapan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi dan pembelajaran yang tidak mensyaratkan bisa Calistung
- h. Optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam mendukung pendidikan inklusif
- i. Optimalisasi kepatuhan POS AN dan Sulingjar
- j. Peningkatan kesehatan peserta didik di satuan pendidikan
- k. Optimalisasi peran Mitra Pembangunan dalam mendukung program prioritas
- l. Optimalisasi indeks kualitas Data Pokok Pendidikan
- m. Optimalisasi peningkatan capaian AKS, APS, dan APK melalui pencegahan dan penanganan ATS
- n. Optimalisasi perencanaan berbasis data melalui SPM Pendidikan

D.2 **Isu Strategis Internal**

Beberapa permasalahan/isu strategis internal yang menjadi perhatian antara lain:

- a. Belum meratanya kompetensi SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan mutu pendidikan
- b. Menciptakan budaya belajar sepanjang hayat bagi seluruh pegawai secara mandiri dalam rangka optimalisasi transformasi UPT
- c. Pengembangan kapasitas SDM dilakukan secara proaktif, dinamis, dan mandiri serta mengarah pada *asset based thinking* bukan *deficit based thinking*
- d. Optimalisasi pemanfaatan ragam media komunikasi dan publikasi lembaga untuk memaksimalkan informasi hasil capaian kinerja satuan kerja pada semua pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan
- e. Pembangunan zona integritas dalam mendukung reformasi birokrasi internal
- f. Peningkatan layanan publik yang ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan



E. Peran Strategis

BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam:

1. Mengawal keterlaksanaan dan keberlanjutan program prioritas Kemendikbudristek dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan
2. Menyelaraskan regulasi pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan dalam bentuk advokasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi
3. Melakukan sinkronisasi program peningkatan mutu pendidikan pada pemerintah daerah dengan program prioritas Kemendikbudristek
4. Mengoptimalkan kolaborasi dan kerjasama antara BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya
5. Meningkatkan kompetensi dan partisipasi aktif ASN BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian kinerja organisasi.

BAB II | PERENCANAAN KINERJA

Visi dan misi BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global yang mendukung visi dan misi Presiden.

Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan aspek penting dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar bagi berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005- 2025), Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 (RPJMN 2020-2025), dan Visi Indonesia 2045 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah “... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”
- b. RPJPN 2005-2025 memiliki visi “... terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI”
- c. Dua dari sembilan misi Presiden yaitu “Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”
- d. Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” serta salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045, yaitu “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Untuk mengawal pencapaian visi dan misi di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan motto yakni “Melayani Sepenuh HATI.” HATI merupakan akronim dari nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya kerja dan pelayanan pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan yaitu Humanis, Amanah, Tanpa pamrih, dan ber-Integritas.

Perumusan tujuan dan indikator kinerja tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	• Peningkatan mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan
	• Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA TUJUAN	• Meningkatnya mutu pembelajaran satuan pendidikan (PAUD Dikmas) di Provinsi Sumatera Selatan
	• Meningkatnya rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Selatan
	• Tercapainya SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan predikat memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
	• Tercapainya nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan RKAKL minimal 85

Matriks Kinerja

Matriks Kinerja Jangka Menengah LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 menetapkan target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) seperti yang tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Matriks Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan (IKK)	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang Pendidikan					
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	5	5	5	5
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95	95,2	95,4	95,6	95,8
SK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Selatan					
IKK 2.1	Rata-rata Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Selatan	BB	A	A	A	A
IKK 2.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	81	82	83	84	85
IKK 2.3	Mendapat predikat ZI-WBK	-	-	√	√	√

Pada tahun 2022 bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dilakukan penyesuaian rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 berdasarkan Permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Penyesuaian tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang diundangkan tanggal 29 Maret 2022 dan terdapat penyesuaian pada Matriks Kinerja Jangka Menengah BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Matriks Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Baseline		Target Kinerja		
		2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang Pendidikan					
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	-	-	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	-	-	25,00	30,00	35,00
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	BB	A	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	81	83	83	84	94

B. Program Prioritas

B.1 Satuan PAUD, Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya

BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Merdeka Belajar, turut serta melaksanakan Pembinaan Sekolah Penggerak, Pembinaan Kurikulum Merdeka, Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah, Transformasi Digital untuk Pembelajaran, Rapor Pendidikan dan PBD untuk Satuan Pendidikan, Rapor Pendidikan dan PBD untuk Pemda dan Publik, Kemitraan Daerah dan Advokasi, Asesmen Nasional, Pembinaan Transfer Daerah, Pembinaan Digitalisasi Sekolah, Pembinaan Perencanaan Berbasis Data, Pembinaan Kemitraan, Pembinaan Asesmen Nasional, Publikasi dan Komunikasi, Transformasi Tata Kelola dan Regulasi, Transisi PAUD-SD,

Pemulihan Pembelajaran, Gerakan Sekolah Sehat (GSS), Pendidikan Inklusi, dan Analisis Data Pendidikan.

Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program Prioritas BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Nama Program Prioritas	Target Sasaran 2024	Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
a	Pembinaan Kurikulum Merdeka	10.303 satuan Pendidikan	998.665.000
b	Pembinaan Asesmen Nasional	8.243 satuan pendidikan meningkat pemahaman urgensi Kebijakan AN dan Sulingjar. 111 satuan pendidikan meningkat pemahaman urgensi Kebijakan Ujian Kesetaraan	872.690.000
c	Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (Regulasi dan Tata Kelola)	6 Kab/Kota dengan AKS PAUD >75% 14 kab/kota dengan APS 7-12 tahun >99% 12 kab/kota dengan APS 13-15 tahun >95%	1.820.764.000
d	Pembinaan Sekolah Penggerak	- PSP Angkatan 1: 82 sekolah - PSP Angkatan 2: 237 Sekolah - PSP Angkatan 3: 112 sekolah - Sekolah Imbas: 246 sekolah	1.236.587.000
e	Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data	11.359 satuan pendidikan 18 Pemda	1.092.838.000
f	Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan	18 Pemda	1.440.663.000
g	Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah (Sumber Daya Sekolah)	6.870 satuan pendidikan Penerima BOS menggunakan SIPLAH, 4.172 satuan pendidikan penerima BOP menggunakan SIPLAH 18 Dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan. 11.562 satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui	2.940.144.000

No	Nama Program Prioritas	Target Sasaran 2024	Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
		ARKAS tepat waktu/masuk penyaluran gelombang I • 6.955 satuan pendidikan penerima BOS melakukan perencanaan pada T-1 • 5.215 satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1 • 100% aktivasi akun belajar PAUD • Peningkatan adopsi pemanfaatan GWfE di 12.909 satuan pendidikan • 3.508 satuan pendidikan penerima bantuan TIK telah memanfaatkan chromebook dalam proses pembelajaran • 8 pemda di Sumatera Selatan menjadi daerah champion. • 18 Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	
h	Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi	48 Konten publikasi/webinar podcast	222.897.000
i	Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran	18 pemda (provinsi dan 17 kab/kota)	703.184.000
j	Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat	18 pemda (provinsi dan 17 kab/kota)	618.171.000
k	Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus	7.427 satuan pendidikan	957.423.000
l	Pelaksanaan Transisi PAUD-SD	17 pemda (4 kota dan 13 kabupaten)	366.932.000

a. Pembinaan Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran. Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak cukup signifikan. Adapun

indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 75% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui progres belajar dan pemanfaatan perangkat ajar; satuan pendidikan yang mengikuti pendampingan IKM, dan satuan pendidikan yang memiliki komunitas belajar di dalam sekolah dengan aktivitas yang berfokus pada permasalahan peserta didik, 50% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka yang berada pada level 1 dan 2 pada Asesmen Nasional (AN) 2023 menunjukkan peningkatan kualitas hasil pada AN 2024 untuk capaian literasi, numerasi, karakter, dan indeks pembelajaran, 75% Pemerintah Daerah, Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah), dan orang tua memiliki persepsi positif terhadap IKM.

b. Pembinaan Asesmen Nasional

Asesmen Nasional (AN) adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) terkait Literasi dan Numerasi, Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar (Sulingjar). Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap Kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%, meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Ujian Kesetaraan (UK) sebesar 30% dan menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN dan Sulingjar Tahun 2023 sebesar 50%.

c. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah (Regulasi dan Tata Kelola)

Dalam rangka mendukung percepatan capaian indikator dan target kinerja program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, diperlukan juga peningkatan partisipasi pendidikan melalui strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Semakin tinggi angka partisipasi pendidikan, maka semakin rendah ATS. Hal ini dapat diantaranya dapat dilihat dari indikator capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk capaian indikator dan target, dilakukan peningkatan capaian Angka Kesiapan Sekolah (AKS) > 75%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 tahun > 99 %, APS 13 - 15 Tahun > 95 %, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 16 - 18 Tahun > 95 %.

d. Pembinaan Program Sekolah Penggerak (PSP)

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui

terciptanya Pelajar Pancasila. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 100% satuan pendidikan pelaksana PSP mengalami peningkatan kualitas transformasi satuan pendidikan, 100% satuan pendidikan PSP angkatan 1 dan 50% satuan pendidikan PSP angkatan 2 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya dan 50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.

e. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data

Rapor Pendidikan merupakan kebijakan Kemendikbudristek berdasarkan Permendikbudristek No 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Rapor pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Platform ini ditujukan untuk satuan pendidikan agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data. Satuan pendidikan dapat melihat secara detail elemen-elemen dari setiap dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: Berjalannya transformasi satuan pendidikan dengan capaian dan memiliki delta positif (95% Satuan PAUD Log in Rapor Pendidikan, 95% Satuan PAUD Unduh Rapor Pendidikan, 99% Satuan Pendidikan jenjang Dasar dan Menengah Log in Rapor Pendidikan, 99% Satuan Pendidikan jenjang Dasar dan Menengah unduh Rapor Pendidikan, 99% Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Luar Biasa Log in Rapor Pendidikan, 99% Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Luar Biasa unduh Rapor Pendidikan, 100% SKB Log in Rapor Pendidikan, 90% Dasar dan Menengah unduh Rapor Pendidikan, 80% PKBM Log in Rapor Pendidikan, 70% PKBM unduh Rapor Pendidikan. Selanjutnya, Rapor Pendidikan Daerah menampilkan kondisi profil pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Pemerintah Daerah dapat menjadikan Rapor Pendidikan acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, publik juga dapat mengakses Rapor Pendidikan sebagai upaya gotong royong membenahi kualitas pendidikan. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 70% Pemda mengalami perubahan perilaku dalam perencanaannya dengan melaksanakan perencanaan berbasis

data melalui SPM Pendidikan dan 50% Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai perencanaannya.

f. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan

Dalam kerangka transformasi yang diluncurkan Ditjen PAUD Dikdasmen dimana salah satu strateginya adalah transformasi satuan pendidikan melalui kemitraan daerah dan advokasi. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 100% Kepala BBPMP/BPMP dan Kabag/Kasubag Umum melaksanakan coaching dan mentoring di tahun 2024, 100% BBPMP/BPMP melaksanakan Komunitas Belajar rutin untuk internal dan antar BBPMP/BPMP di tahun 2024, 20% dari kebutuhan Kepala Sekolah diangkat dari Guru Penggerak di tahun 2024, 50% dari kebutuhan Pengawas Sekolah diangkat dari Guru Penggerak di tahun 2024, 90% Pemda melaksanakan PPDB sesuai dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel, 100% Pemda dan 100% Satpen mempunyai satgas PPKSP (Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan) Untuk PAUD pada bulan Agustus 2024 Untuk SD, SMP, SMA pada bulan Februari 2024.

g. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah

Pembinaan Digitalisasi Sekolah mencakup 3 program prioritas yaitu Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah, Transformasi Digital untuk Pembelajaran, dan Analisis Data Mutu Pendidikan.

Transformasi Digital untuk Sumber Daya Sekolah berfokus pada Dana Transfer Daerah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) diterima oleh 12.170 Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat. BOSP terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD untuk KB/PAUD/TK/SPS dan BOP Kesetaraan (PKBM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SMP/SMA/SMK/SLB. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOSP Tahun 2024 lampiran II bahwa hasil penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) diinput/dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian, yang disebut aplikasi platform Sumber Daya Sekolah (SDS) yang merupakan platform terintegrasi antara ARKAS, Dapodik, Markas, dan SIPD. Aplikasi ini juga digunakan dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 90% Satuan pendidikan penerima BOS menggunakan SIPLAH, 50% Satuan pendidikan BOP menggunakan SIPLAH, 80% Dinas pendidikan

memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan, 90% Satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu/masuk penyaluran gelombang I [baseline: rata-rata tahap I sebesar 47%, rata-rata tahap , 100% Satuan pendidikan penerima BOS melakukan perencanaan pada T-1 dan 50% Satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1.

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan program yang berdampak pada peserta didik melalui beragam program prioritas yang memerlukan dukungan semua ekosistem. Dalam rangka mendukung hal tersebut Kemendikbudristek kemudian menindaklanjuti dengan melaksanakan Transformasi Digital untuk Pembelajaran melalui pengadaan serta pemanfaatan Chromebook dan belajar.id untuk membantu pemanfaatan platform digital di satuan pendidikan dalam mendukung proses transformasi pembelajaran. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: meningkatkan aktivasi akun belajar.id menjadi 100% di luar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan, meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan *Google Workspace for Education* menjadi 100% satuan pendidikan [minimal 25% guru per satuan pendidikan memanfaatkan GWE, meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat dan DAK TIK dan meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion menjadi 8 pemda di provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Indeks Kualitas Dapodik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas data yang dikumpulkan melalui sistem Dapodik. Indeks ini tidak hanya memperhatikan kelengkapan data, tetapi juga keakuratan, validitas, serta ketepatan waktu penginputan data. Data yang baik sangat penting untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang tepat di sektor pendidikan. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

h. Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi

Semakin pesatnya perkembangan dunia informasi dan teknologi turut mendorong Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan untuk ikut berkembang melalui beberapa inovasi yang dihadirkan dalam bentuk kegiatan. Inovasi tersebut merupakan program kegiatan publikasi dan komunikasi yang pencapaiannya tersampaikan ke masyarakat luas. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 48 konten Kebijakan Merdeka Belajar dan program prioritas khususnya di bawah PDM lebih dirasakan manfaatnya oleh Stakeholder pendidikan.

i. Pemulihan Pembelajaran

Pemulihan pembelajaran merupakan upaya menanggulangi krisis pembelajaran di Indonesia melalui berbagai ragam kegiatan antara lain ToT yang dilanjutkan Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui Peningkatan Literasi Daerah, Pendampingan Komunitas belajar, dan Refleksi Intervensi UPT terkait penguatan literasi yang diinisiasi Kemendikbudristek. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SKB/PKBM dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran, 50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi dan penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi.

j. Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat

Dalam upaya meningkatkan kesehatan peserta didik, Kemendikbudristek telah menetapkan Kebijakan Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Gerakan ini bertujuan memberi ruang kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik secara berkelanjutan dan fokus pada 5 sehat. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 80% Satuan Pendidikan di Indonesia mengetahui Gerakan Sekolah Sehat, 90% Satuan Pendidikan Mengimplementasikan Secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa, 95% Satuan Pendidikan Binaan mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa dan 100% Satuan Pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA/SLB terpetakan status kebugarannya.

k. Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus

Pendidikan inklusi adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 100% Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif, 768 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar), 383 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan), 186 pendidik mengikuti pendidikan

berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir) dan 11 Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif.

I. Pelaksanaan Transisi PAUD-SD

Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan sebuah gerakan untuk memastikan bahwa dimana pun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gerakan ini digagas untuk memastikan keselarasan pembelajaran dari jenjang PAUD ke SD, tidak ada patahan, sehingga peserta didik baik yang melalui PAUD maupun tidak melalui PAUD tetap mendapatkan haknya untuk dibina kemampuan fondasinya, yaitu kemampuan mengenal nilai agama dan budi pekerti, kemampuan sosial dan bahasa, kematangan emosi, pemaknaan terhadap belajar yang positif, keterampilan motorik dan perawatan diri, dan kematangan kognitif. Suksesnya gerakan ini dicapai melalui tiga target perubahan, yaitu meniadakan tes calistung proses penerimaan peserta didik baru di SD, menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama (di PAUD dan SD) dan melakukan asesmen awal, dan menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak (di PAUD dan SD).

B.2. Layanan Dukungan Manajemen Internal

a. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)

Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi internal, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyederhanaan struktur dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait agar tata kelola organisasi menjadi fleksibel dan efisien. BPMP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Mendikbudristek Nomor 29/0/2022 telah berhasil dan ditetapkan menjadi salah satu satuan kerja dengan status Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Selanjutnya, dengan status tersebut BPMP Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi secara aktif dalam mendampingi satuan kerja lain yang masih berproses meraih predikat ZI WBK. Sehubungan penerapan RBI ditahun 2023 tim BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendampingan Reformasi Birokrasi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) kepada BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas partisipasi ini, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menerima penghargaan dari Sekretariat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas adalah sistem yang dirancang untuk membantu penerima amanah mempertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya dengan tujuan terjadi perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja (*IT-based*).

Sehubungan dengan hal tersebut BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 menetapkan target A berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. BPMP Provinsi Sumatera Selatan selalu akan melakukan peningkatan perbaikan pertanggungjawaban efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga di tahun 2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil merealisasikan pencapaian sesuai target target dengan mendapatkan nilai A yang secara poin terjadi peningkatan dari 86.85 menjadi 90.00, Sehubungan dengan pencapaian tersebut BPMP Provinsi Sumatera Selatan senantiasa berkomitmen bersama beberapa hal yang akan dilakukan:

1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital sebagai platform kolaborasi di internal BPMP melalui aplikasi SPASIKITA Kemendikbudristek
2. Menjadwalkan rapat rutin secara berkala terkait pengukuran kinerja terhadap capaian Indikator kinerja kegiatan sehingga mengetahui terkait dengan progress, kendala dan hambatan serta membuat strategi atau tindak lanjut dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi.
3. Sosialisasi Perjanjian Kinerja pada seluruh karyawan melalui apel dan rapat rutin senin;
4. Workshop Penyusunan Laporan Kinerja tahun berjalan
5. Reviu laporan kinerja oleh tim evaluasi
6. Melaksanakan akuntabilitas mandiri satker melalui aplikasi SPASIKITA
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dan di-input pada aplikasi SPASIKITA.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran
2020	Rp28.997.711.000
2021	Rp32.340.861.000
2022	Rp26.941.520.000
2023	Rp33.579.985.000
2024	Rp34.258.979.000

Pagu anggaran LPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar Rp58.101.876.000. Pada saat pandemi Covid-19, maka ada *refocusing* anggaran LPMP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 tahap masing-masing sebesar Rp26.512.237.000 (Tahap 1), Rp1.125.000.000 (Tahap 2), Rp1.125.000.000 (Tahap 3), dan sebesar Rp 973.353.000 (Tahap 4) sehingga total anggaran LPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp 28.997.711.000.

Pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020. Pada tahun 2022, pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan kembali mengalami penurunan jumlah pagu anggaran. Hal ini disebabkan adanya perubahan organisasi dan tata kerja dari LPMP ke BPMP sesuai Permendikbudristek nomor 11 tahun 2022. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023-2024.

Adapun rencana kerja dan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.6 Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
419528	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Rp35.382.192.000	Rp34.258.979.000
6397.QDB.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Rp14.277.560.000	Rp13.968.841.000
6397.QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Rp296.734.000	Rp296.734.000
2005.EBA.956	Layanan BMN	Rp0	Rp10.000.000
2005.EBA.962	Layanan Umum	Rp475.000.000	Rp487.450.000

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
2005.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp18.749.674.000	Rp17.823.424.000
2005.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp1.583.224.000	Rp1.969.264.000



D. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 s.d. 2024, maka dituangkan ke dalam perjanjian kinerja sebagai berikut,

Tabel 2.7 Matriks Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2020 s.d. 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020			Target 2021		
			Renstra	PK	%	Renstra	PK	%
SK 1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan							
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	Persentase	26,5	26,5		27,4	27,4	
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	Persentase	5	5	%	5	5	
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan		95	95		95,2	95,2	
SK 2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Selatan							
IKK 2.1	Rata-rata Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Selatan	Predikat	BB	BB		A	A	
IKK 2.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	Nilai Kinerja	81	81		82	82	
IKK 2.3	Mendapatkan predikat ZI-WBK	Predikat	-	-		-	-	

Terjadi Revisi Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dan penyesuaian tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang diundangkan tanggal 29 Maret 2022, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran, indikator, dan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.8 Matriks Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2022 s.d. 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2022			Target 2023			Target 2024		
			Ren stra	PK	%	Ren stra	PK	%	Ren stra	PK	%
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan										
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persen tase	0,98	0,98		1,96	1,96		3,92	3,92	
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Persen tase	25	25		30	30		35	35	
SK 2	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel										
IKK 2. 1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Predikat	A	A		A	A		A	A	
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Nilai Kinerja	83	83		84	84		85	94	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai sasaran (kinerja) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan dilakukan dalam upaya memberikan kontribusi memenuhi visi Presiden Republik Indonesia dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu “Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

A. Capaian Kinerja



Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dua sasaran kinerja dengan empat indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3,92	4,61	117,60%
2	[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	35	100	285,71%
3	[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	nilai	A	A	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
4	[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	%	94	97,65	103,88%

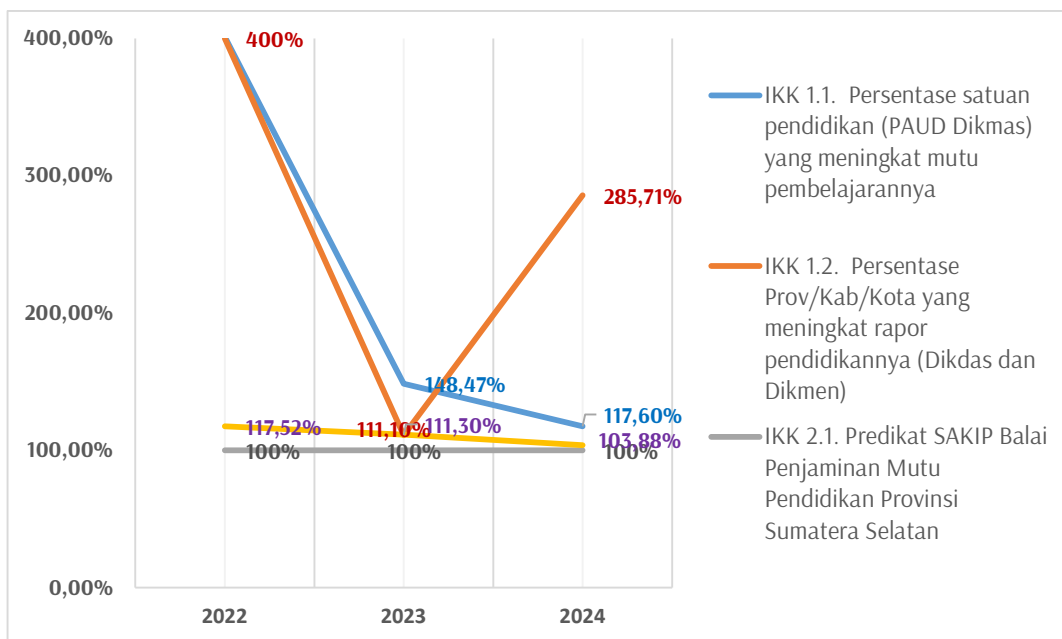
Tergambar bahwa dari dua sasaran dan empat indikator kinerja target yang ditetapkan BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sudah merealisasikan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan untuk IKK 1.1, IKK 1.2 serta IKK 2.2 realisasi yang dicapai sudah melampaui target yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020-2024 dan analisis perbandingan target dan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 -2024

SK dan IKK	Target, Realisasi, Capaian Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan						
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Target Renstra	-	-	0,98	1,96	3,92
	Target PK	-	-	0,98	1,96	3,92
	Realisasi	-	-	3,93	2,91	4,61
	Capaian Kinerja	-	-	401,02%	148,47%	117,60%
IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Target Renstra	-	-	25	30	35
	Target PK	-	-	25	30	35
	Realisasi	-	-	100	33,33	100
	Capaian Kinerja	-	-	400%	111,10%	285,71%
SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel						
IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target Renstra	BB	A	A	A	A
	Target PK	BB	A	A	A	A
	Realisasi	BB	BB	A	A	A

SK dan IKK	Target, Realisasi, Capaian Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Capaian Kinerja	100%	83,33%	100%	100%	100%
IKK2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target Renstra	81	82	83	84	85
	Target PK	81	82	83	84	94
	Realisasi	89,95	82,81	97,54	93,49	97,65
	Capaian Kinerja	111,05%	100,99%	117,52%	111,30%	103,88%



Gambar 3.1 Tren Capaian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2024

BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dua sasaran kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

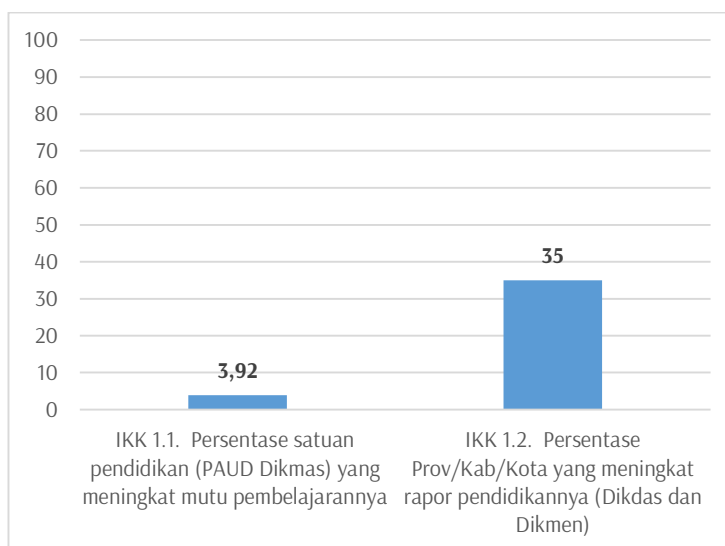
Sasaran Kegiatan 1



Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, khususnya pasal 1 ayat 1, bahwa “Evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan”.

Bentuk penjaminan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 tertuang dalam target kinerja sasaran kegiatan berikut.



Gambar 3.2 Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Hasil (*output*) penjaminan mutu pendidikan di atas bermuara pada peningkatan mutu pembelajaran satuan pendidikan PAUD dan Dikmas, serta peningkatan nilai rapor pendidikan provinsi/kabupaten/kota pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) adalah Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, untuk ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.



IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

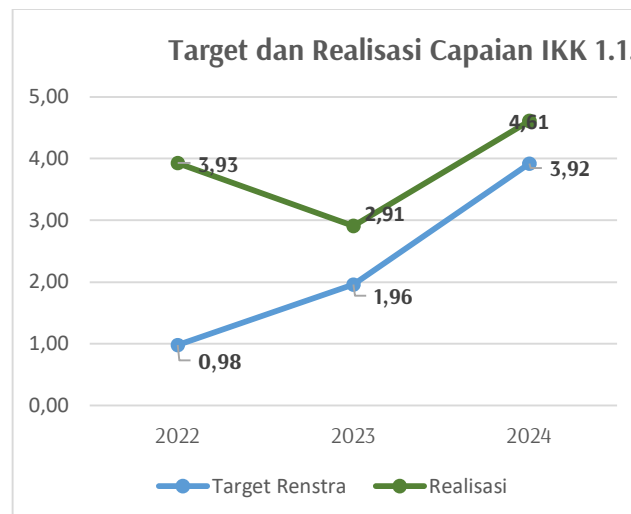
Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya adalah Persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar.

Target, Realisasi dan Capaian

Target kinerja “Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya” pada Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 3,92.

Capaian IKK 1.1 berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar belum bisa disajikan sampai dengan laporan kinerja ini disusun, dikarenakan hasil rapor pendidikan belum dirilis oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Oleh karena itu, realisasi capaian IKK 1.1 pada tahun 2024 menggunakan data akreditasi dari BAN PDM tahun 2024.

Berdasarkan hasil akreditasi dan perhitungan persentase satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 4,61, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 117,60%. Capaian ini melampaui target renstra dan perjanjian kinerja tahun 2024, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.1 Tahun 2022-2024

Nilai realisasi capaian IKK 1.1 sebesar 4,60 diperoleh berdasarkan data akreditasi tahun 2023-2024. Data ini bersumber dari BAN-PDM, PSKP, BSKAP, dan Pusdatin yang dilakukan perhitungan dengan rumus berikut.

$$IKK\ 1.1\ (\Delta) = \frac{(0,5 \times A_{24}) + (0,35 \times 4) + (0,15 \times C_{24})}{total\ sekolah\ TA\ 2024} - \frac{(0,5 \times A_{23}) + (0,35 \times B_{23}) + (0,15 \times C_{23})}{total\ sekolah\ TA\ 2023}$$

Keterangan:

1. Δ : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2023 ke TA 2024 yang dilihat dari nilai akreditasi
2. A_{24} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2024
3. B_{24} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2024
4. C_{24} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2024
5. A_{23} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2023
6. B_{23} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2023
7. C_{23} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2023

Data hasil akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Data Akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 -2024

Provinsi Sumatera Selatan	Data Akreditasi								Minimal B bobot
	A	B	Belum Terakreditasi	C	Terakreditasi	Tidak diisi	Tidak Terakreditasi	Jumlah Sekolah	
Tahun 2024	79	1969	0	1492	0	1867	25	5432	17.53
Tahun 2023	70	1491	289	946	8	2621	7	5432	12.92

Catatan: Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember)

Dengan memasukkan data akreditasi tersebut ke rumus perhitungan IKK 1.1 diperoleh nilai minimal B bobot tahun 2023-2024 dan nilai IKK 1.1 berikut.

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Provinsi Sumatera Selatan	Minimal B bobot
Tahun 2023	17.53
Tahun 2022	12.92
IKK 1.1 (Δ)	4.61



Gambar 3.4 Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2022, 2023, dan 2024

Pada tahun 2022 realisasi IKK 1.1 sebesar 3,93 dari target 0,98 kemudian pada tahun 2023 realisasi sebesar 2,91 terhadap target 1,96 dan pada tahun 2024 dengan target kinerja sebesar 3,92 terealisasi sebesar 4,60. Capaian kinerja mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah melampaui target dengan persentase capaian kinerja sebesar 401,02% pada tahun 2022, 148,47% pada tahun 2023, dan sebesar 117,60% pada tahun 2024 dengan tren menurun dikarenakan target yang terus meningkat.

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan, melalui advokasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK 1.1. di mana setiap program dan kegiatan tersebut diidentifikasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya melalui indikator objektif sebagai berikut.

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya		
A	Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka		
1	75% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka Menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM melalui progres belajar dan pemanfaatan perangkat ajar;	75%	77.47%

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
	satuan pendidikan yang mengikuti pendampingan IKM, dan satuan pendidikan yang memiliki komunitas belajar di dalam sekolah dengan aktivitas yang berfokus pada permasalahan peserta didik		
2	50% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka yang berada pada level 1 dan 2 pada AN 2023 menunjukkan peningkatan kualitas hasil pada AN 2024 untuk capaian literasi, Numerasi, Karakter, dan Indeks pembelajaran	50%	50%
3	75% Pemerintah Daerah, Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah), dan orang tua memiliki persepsi positif terhadap IKM.	75%	86.93%
B	Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional		
1	Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap Kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%.	23,79%.	82.55%
2	Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Ujian Kesetaraan (UK) sebesar 30%.	30%.	85.53%
3	Menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN dan Sulingjar Tahun 2023 sebesar 50%.	50%	95.33%
C	Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak		
1	100% satuan pendidikan pelaksana PSP mengalami peningkatan kualitas transformasi satdik	100%	100%
2	100% satdik PSP angkatan 1 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya	100%	100%
3	50% satdik PSP angkatan 2 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya	50%	98,31%
4	50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.	50%	17%
D	Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data		
1	Satuan PAUD Log in Rapor Pendidikan	95%	97,60%
2	Satuan PAUD Unduh Rapor Pendidikan	95%	97,31%
3	Satuan SKB Log in Rapor Pendidikan	100%	100%
4	Satuan SKB Unduh Rapor Pendidikan	90%	100%
5	Satuan PKBM Log in Rapor Pendidikan	80%	97,40%
6	Satuan PKBM Unduh Rapor Pendidikan	70%	97,40%

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
7	Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui indikator prioritas SPM Pendidikan	70%	100%
8	Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui sub-kegiatan	70%	100%
9	Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai perencanaannya	50%	77,78%
E	Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan		
1	20% dari kebutuhan Kepala Sekolah diangkat dari Guru Penggerak di tahun 2024	20%	40,47%
2	50% dari kebutuhan Pengawas Sekolah diangkat dari Guru Penggerak di tahun 2024	50%	8,80%
3	100% Pemda mempunyai satgas PPKSP (Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	100%	100%
4	100% Satpen mempunyai satgas PPKSP (Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan	100%	96,30%
F	Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah		
1	Satuan pendidikan penerima BOS menggunakan SIPLAH	90%	84,33 %
2	Satuan pendidikan BOP menggunakan SIPLAH	50%	20,45%
3	Dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan	80%	22%
4	Satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu/masuk	90%	97,36%
5	Satuan pendidikan penerima BOS melakukan perencanaan pada T-1	100%	72,92%
6	Satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1	50%	67,12%
7	Meningkatkan aktivasi akun belajar.id menjadi 100% di luar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan.	100%	75,13%
8	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan Google Workspace for Education menjadi 100% satuan pendidikan	100%	89,97%
9	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat dan DAK TIK	100%	100%
10	Meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion menjadi 8 pemda di Sumatera Selatan.	8	16
11	100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	100%	72,22%

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
G	Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi		
1	Dalam 1 tahun minimal terdapat 48 konten program prioritas yang diunggah	48	135
2	Dalam 1 tahun minimal ada 2 komunitas yang dilibatkan dalam komunikasi program prioritas	2	2
3	Dalam 1 tahun minimal ada 2 output konten program prioritas yang dimedia placementkan	2	2
4	Dalam 1 tahun minimal ada 5 kali webinar yang diadakan UPT	5	5
5	Dalam 1 tahun minimal ada 2 kali podcast yang dilaksanakan UPT	2	2
H	Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran		
1	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SKB/PKBM dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran	100%	90,13%
2	50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi.	9	10
3	Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi	5	5
I	Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat		
1	80% Satuan Pendidikan mengetahui Gerakan Sekolah Sehat	80%	80%
2	90% Satuan Pendidikan Mengimplementasikan Secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa	90%	90%
3	95% Satuan Pendidikan Binaan mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa	95%	95%
4	100% Satuan Pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA/SLB terpetakan status kebugarannya	100%	100%
J	Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus		
1	Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif	100%	85%
2	3768 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar)	100%	448%
3	383 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan)	100%	37%

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
4	186 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)	100%	0%
5	11 Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif	11	18
K	Pelaksanaan Transisi PAUD-SD		
1	50% guru SD kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung peserta didik	50%	70,72%
2	50% satuan PAUD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	50%	50%
3	50% SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	50%	54%
4	100% SD Negeri tidak melakukan tes calistung saat PPDB	100%	97,11%
5	25% SD Swasta tidak melakukan tes calistung saat PPDB	25%	88,30%
6	50% satuan PAUD melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	50%	60,7%
7	70% SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	70%	71,1%

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Pendampingan pelaksanaan program Akreditasi *Compulsory* (Sampling Acak) bersama Direktorat PAUD dan BAN PDM
2. Pendampingan melekat pelaksanaan Program Kesiapan Bersekolah Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan kepada pemerintah daerah
3. Pendampingan melekat terhadap implementasi survei lingkungan belajar di sekolah jenjang PAUD bersama Direktorat PAUD
4. Adanya fasilitasi program prioritas Kemendikbudristek lintas unit utama/satuan kerja.

Kendala dan Permasalahan

1. Terdapat miskonsepsi dalam implementasi Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan bagi guru kelas awal sekolah dasar, pengawas pendamping satuan Pendidikan, dan kurangnya pemahaman di tataran orang tua peserta didik
2. Keterbatasan inspirasi guru kelas awal dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta berfokus pada pembinaan kemampuan fondasi anak usia dini
3. Masih rendahnya kemauan guru kelas awal untuk proaktif mencari informasi melalui sumber-sumber belajar dan ragam alat bantu yang telah disediakan Kemdikbudristek

Langkah Antisipasi

1. Memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dukungan Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan diantaranya melalui penerbitan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan 17 Kabupaten/Kota tentang implementasi gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan dan SK Forkom PAUD-SD 17 Kabupaten/Kota
2. Melakukan advokasi dan koordinasi kepada Dinas Pendidikan, organisasi mitra (Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, KKG), dan Kemenag.

Strategi

1. Melakukan pendampingan melekat tiga target perubahan Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan
2. Melakukan sosialisasi dan berbagi praktik baik penguatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi di kelas awal oleh guru alumni bimtek, alumni magang, dan melalui video inspirasi pembelajaran



IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) adalah Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.

Target, Realisasi dan Capaian

Target kinerja “Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)” BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 35% atau sebanyak 6 daerah (prov/kab/kota) meningkat rapor pendidikannya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, terdapat 18 daerah (prov/kab/kota) telah meningkat rapor pendidikannya dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 285,71% yang berarti melampaui target renstra dan perjanjian kinerja tahun 2024. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut.



Gambar 3.5 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 Tahun 2022-2024

Untuk menghitung capaian kinerja IKK 1.2. menggunakan rumus perhitungan berikut.

$$IKK\ 1.2 = \sum_{i=1}^n flag(\Delta_i)$$

Keterangan :

1. i : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP Provinsi Sumatera Selatan (1 provinsi dan 17 kab/kota)
2. $flag(\Delta_i)$: Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

IKK 1.2 dihitung berdasarkan jumlah prov/kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran melalui perhitungan indeks SPM rapor pendidikan prov/kab/kota pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Perhitungan Nilai IKK 1.2 Berdasarkan Kenaikan Mutu Pembelajaran Prov/Kab/Kota Tahun 2023 dan 2024

Nama Kabupaten/Kota	Indeks SPM				Flag
	2023	2024	Label	Delta	
Kab. Ogan Komering Ulu	52,46	65,07	Tuntas Muda	12,61	1
Kab. Ogan Komering Ilir	52,00	65,52	Tuntas Muda	13,52	1
Kab. Muara Enim	55,24	70,69	Tuntas Pratama	15,45	1
Kab. Lahat	51,86	61,24	Tuntas Muda	9,38	1
Kab. Musi Rawas	50,75	67,41	Tuntas Muda	16,66	1
Kab. Musi Banyuasin	51,40	70,21	Tuntas Pratama	18,81	1
Kab. Banyuasin	52,35	70,95	Tuntas Pratama	18,60	1

Nama Kabupaten/Kota	Indeks SPM				Flag
	2023	2024	Label	Delta	
Kab. OKU TIMUR	65,79	77,46	Tuntas Pratama	11,67	1
Kab. OKU Selatan	49,21	60,30	Tuntas Muda	11,09	1
Kab. Ogan Ilir	52,63	68,54	Tuntas Muda	15,91	1
Kab. Empat Lawang	45,57	56,17	Belum Tuntas	10,60	1
Kab. PALI	50,70	69,71	Tuntas Muda	19,01	1
Kab. Musi Rawas Utara	51,92	64,76	Tuntas Muda	12,84	1
Kota Palembang	65,85	77,06	Tuntas Pratama	11,21	1
Kota Pagaralam	57,21	71,71	Tuntas Pratama	14,50	1
Kota Lubuklinggau	54,99	72,12	Tuntas Pratama	17,13	1
Kota Prabumulih	65,80	76,18	Tuntas Pratama	10,38	1
Prov. Sumatera Selatan	43,42	62,39	Tuntas Muda	18,97	1
Jumlah prov/kab/kota yang mengalami kenaikan mutu pembelajarannya					18
Jumlah prov/kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan					18
Persentase Kenaikan					100,00%
Target Capaian IKK 1.2					35%
Realisasi Capaian IKK 1.2					285,71%

Sumber data: Data Olah Rapor Pendidikan – PSKP



Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Tahun 2022, 2023 dan 2024

Pada tahun 2022, data yang dipergunakan dalam perhitungan terkait capaian indikator 1.2 adalah berdasarkan data hasil akreditasi sekolah. Sementara pada tahun 2023 dan 2024, data yang dipergunakan dalam perhitungan berdasarkan pada kenaikan mutu pembelajaran melalui perhitungan indeks SPM rapor pendidikan prov/kab/kota.

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan, melalui advokasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK 1.2. di mana setiap program dan kegiatan tersebut diidentifikasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya melalui indikator objektif sebagai berikut.

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya		
A	Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka		
1	75% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka Menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan PMM melalui progres belajar dan pemanfaatan perangkat ajar; satuan pendidikan yang mengikuti pendampingan IKM, dan satuan pendidikan yang memiliki komunitas belajar di dalam sekolah dengan aktivitas yang berfokus pada permasalahan peserta didik	75%	77.47%
2	50% Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka yang berada pada level 1 dan 2 pada AN 2023 menunjukan peningkatan kualitas hasil pada AN 2024 untuk capaian literasi, Numerasi, Karakter, dan Indeks pembelajaran	50%	50%
3	75% Pemerintah Daerah, Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah), dan orang tua memiliki persepsi positif terhadap IKM.	75%	86.93%
B	Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional		
1	Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap Kebijakan AN dan Sulingjar sebesar 50% dari 23,79%.	23,79%.	82.55%
2	Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Ujian Kesetaraan (UK) sebesar 30%.	30%.	85.53%
3	Menurunkan Partisipasi Satuan Pendidikan yang belum memadai dan belum mengikuti AN dan Sulingjar Tahun 2023 sebesar 50%.	50%	95.33%

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
C	Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak		
1	100% satuan pendidikan pelaksana PSP mengalami peningkatan kualitas transformasi satdik	100%	100%
2	100% satdik PSP angkatan 1 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya	100%	100%
3	50% satdik PSP angkatan 2 menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya	50%	98,31%
4	50% Pemda pelaksana PSP berada pada level komitmen adopsi dalam mendukung PSP.	50%	17%
D	Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data		
1	Satuan PAUD Log in Rapor Pendidikan	95%	97,60%
2	Satuan PAUD Unduh Rapor Pendidikan	95%	97,31%
3	Satuan SKB Log in Rapor Pendidikan	100%	100%
4	Satuan SKB Unduh Rapor Pendidikan	90%	100%
5	Satuan PKBM Log in Rapor Pendidikan	80%	97,40%
6	Satuan PKBM Unduh Rapor Pendidikan	70%	97,40%
7	Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui indikator prioritas SPM Pendidikan	70%	100%
8	Pemda melaksanakan perencanaan berbasis data melalui sub-kegiatan	70%	100%
9	Pemda merealisasikan SPM Pendidikan sesuai perencanaannya	50%	77,78%
E	Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan		
1	20% dari kebutuhan Kepala Sekolah diangkat dari Guru Penggerak di tahun 2024	20%	40,47%
2	50% dari kebutuhan Pengawas Sekolah diangkat dari Guru Penggerak di tahun 2024	50%	8,80%
3	100% Pemda mempunyai satgas PPKSP (Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	100%	100%
4	100% Satpen mempunyai satgas PPKSP (Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan	100%	96,30%
F	Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah		
1	Satuan pendidikan penerima BOS menggunakan SIPLAH	90%	84,33 %

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
2	Satuan pendidikan BOP menggunakan SIPLAH	50%	20,45%
3	Dinas pendidikan memanfaatkan modul integrasi MARKAS-SIPD untuk perencanaan dan Pelaporan	80%	22%
4	Satuan pendidikan penerima BOSP melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu/masuk	90%	97,36%
5	Satuan pendidikan penerima BOS melakukan perencanaan pada T-1	100%	72,92%
6	Satuan pendidikan penerima BOP melakukan perencanaan pada T-1	50%	67,12%
7	Meningkatkan aktivasi akun belajar.id menjadi 100% di luar akun peserta didik PAUD dan kesetaraan.	100%	75,13%
8	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan Google Workspace for Education menjadi 100% satuan pendidikan	100%	89,97%
9	Meningkatkan pemanfaatan Chromebook dalam proses pembelajaran pada 100% satuan pendidikan penerima bantuan TIK melalui Bantuan Pusat dan DAK TIK	100%	100%
10	Meningkatkan jumlah dan sebaran daerah champion menjadi 8 pemda di Sumatera Selatan.	8	16
11	100% Pemda memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	100%	72,22%
G	Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi		
1	Dalam 1 tahun minimal terdapat 48 konten program prioritas yang diunggah	48	135
2	Dalam 1 tahun minimal ada 2 komunitas yang dilibatkan dalam komunikasi program prioritas	2	2
3	Dalam 1 tahun minimal ada 2 output konten program prioritas yang dimedia placementkan	2	2
4	Dalam 1 tahun minimal ada 5 kali webinar yang diadakan UPT	5	5
5	Dalam 1 tahun minimal ada 2 kali podcast yang dilaksanakan UPT	2	2
H	Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran		
1	100% PAUD, SD, SMP, SMA, dan SKB/PKBM dalam ruang lingkup sasaran intervensi mendapatkan dukungan program pemulihan pembelajaran	100%	90,13%
2	50% dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan aksi nyata program benahi literasi dan/atau numerasi.	9	10

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2024	Realisasi Indikator Protas 2024
3	Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi	5	5
I	Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat		
1	80% Satuan Pendidikan mengetahui Gerakan Sekolah Sehat	80%	80%
2	90% Satuan Pendidikan Mengimplementasikan Secara berkelanjutan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa	90%	90%
3	95% Satuan Pendidikan Binaan mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat: Sehat Bergizi, Sehat Fisik, Sehat Imunisasi, Sehat Lingkungan dan Sehat Jiwa	95%	95%
4	100% Satuan Pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA/SLB terpetakan status kebugarannya	100%	100%
J	Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus		
1	Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif	100%	85%
2	3768 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat dasar)	100%	448%
3	383 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat lanjutan)	100%	37%
4	186 pendidik mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusi (tingkat mahir)	100%	0%
5	11 Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif	11	18
K	Pelaksanaan Transisi PAUD-SD		
1	50% guru SD kelas 1 dan 2 memahami strategi pembelajaran yang tidak mensyaratkan kemampuan calistung peserta didik	50%	70,72%
2	50% satuan PAUD melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	50%	50%
3	50% SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran untuk pencapaian kemampuan fondasi	50%	54%
4	100% SD Negeri tidak melakukan tes calistung saat PPDB	100%	97,11%
5	25% SD Swasta tidak melakukan tes calistung saat PPDB	25%	88,30%
6	50% satuan PAUD melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	50%	60,7%
7	70% SD kelas 1 dan 2 melakukan penguatan pembelajaran pada masa MPLS	70%	71,1%

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian target kinerja didukung beberapa faktor berikut.

1. Komitmen bersama pemangku kepentingan daerah untuk mendukung Kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya diwujudkan dengan penandatanganan konsensus oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Terbitnya regulasi yang mendukung pelaksanaan program prioritas Kebijakan Merdeka Belajar.
3. Terjalannya komunikasi yang intens melalui berbagai kanal informasi dan media sosial dengan berbagai pemangku kepentingan.
4. Adanya *Asset Best Thinking* dari beberapa pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan pelaksanaan program prioritas Kemendikbudristek melalui program *cross cutting*.
5. Penyelarasan tim kerja yang lebih terarah melalui PDM yang ada dengan pemerintah daerah.
6. Kolaborasi yang dilakukan BPMP Provinsi Sumatera Selatan diakui oleh pemerintah daerah.
7. Penerapan aplikasi MARKAS yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah (Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)).
8. UPT dapat memantau progres capaian melalui dashboard platform digital yang tersedia.
9. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan daerah melalui pelibatan BPMP dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Kendala dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian target kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Terdapat miskonsepsi terhadap ragam Kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi peran penting dalam transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
2. Keterbatasan pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terhadap ragam platform pendidikan berbasis teknologi yang mendukung transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
3. Pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terhadap ukuran capaian sistem pendidikan yang mempengaruhi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan.
4. Kerjasama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam upaya transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu lebih dioptimalkan

5. Keterbatasan pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terkait konsekuensi yang diterimanya untuk mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya pemulihan pembelajaran dan transformasi pendidikan
6. Komitmen pemangku kepentingan pada ekosistem pendidikan dalam bersinergi, berkolaborasi, dan berbagi peran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan
7. Keterbatasan infrastruktur pendukung dalam transformasi digital yang mendukung implementasi ragam Kebijakan Merdeka Belajar.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program prioritas Kemendikbudristek
2. Memprioritaskan penugasan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sasaran capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program prioritas Kemendikbudristek
3. Meningkatkan intensitas kerja sama dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan pendidikan di daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi BPMP dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam penyelarasan pelaksanaan program prioritas
5. Mengembangkan strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan untuk transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan
6. Melaksanakan advokasi yang lebih fokus dan asimetris kepada pemerintah daerah untuk transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan
7. Optimalisasi, kolaborasi, dan pendampingan melekat terkait implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
8. Lebih mengintensifkan rapat berkala dalam upaya mencapai kinerja, mitigasi risiko, dan manajemen isu
9. Mengaktivasi pertemuan PMO yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara berkala dalam penyelarasan pelaksanaan program

10. Penguatan peran dan *product knowledge* pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memahami Kebijakan Merdeka Belajar
11. Peningkatan kompetensi melalui berbagai bentuk kegiatan seperti *In House Training* (IHT) maupun belajar melalui komunitas belajar (kombel) di internal BPMP maupun kombel antar-UPT Kemendikbudristek

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memperkuat peran dan kapasitas SDM BPMP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unit utama dan direktorat teknis Kemendikbudristek, serta UPT Kemendikbudristek di Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyesuaian program kegiatan.

Sasaran Kegiatan 2



Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) adalah meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, untuk ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.



IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah penilaian atas rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Target, Realisasi dan Capaian

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014, metode perhitungan SAKIP sebagai berikut:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja]+[Pengukuran kinerja]+[Pelaporan Kinerja]+[Evaluasi Kinerja]

Hasil Nilai SAKIP diberikan predikat dan diinterpretasikan seperti ketentuan pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Predikat dan Interpretasi Nilai SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

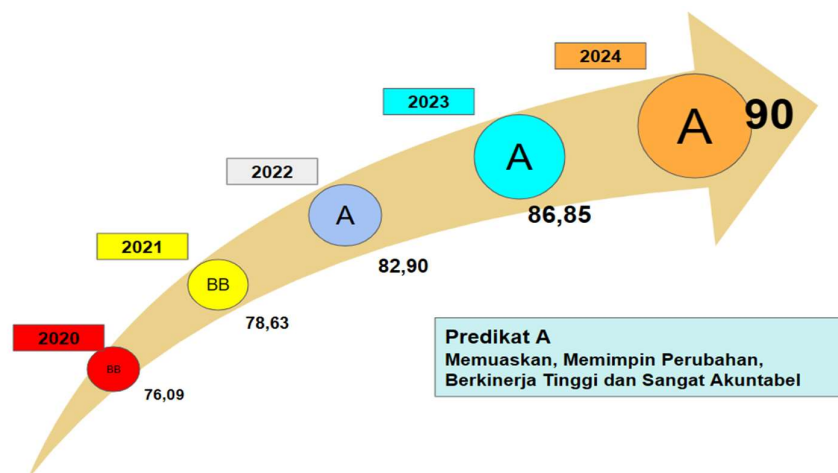
Sumber: Definisi Operasional Indikator Kinerja oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Setditjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia memperoleh nilai 90,00 **Predikat A**, dengan interpretasi **memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel**. Dengan predikat A ini diperoleh persentase capaian kinerja IKK 2.1 sebesar 100% sehingga realisasi kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi target renstra. Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat peningkatan nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan menjadi 90,00 dari 86,85 pada tahun 2023 dengan predikat A dan capaian kinerja 100%.



Gambar 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tingkat implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 3.6 berikut.



Gambar 3.8 Tingkat Implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Nilai implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Setditjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat dilihat sebagai berikut.

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,6
2	Pengukuran Kinerja	30%	27,6
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	90

Faktor pendukung terpenuhinya capaian kinerja IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yaitu renstra, dan perjanjian kinerja;
2. Kegiatan penyusunan rencana kinerja tahunan dan rencana kerja aksi;
3. Kegiatan reviu renstra;
4. Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan;
5. Kegiatan pengukuran kinerja per triwulan, dan;
6. Kegiatan penyusunan laporan kinerja.

Selain itu strategi yang telah dilakukan untuk perbaikan berdasarkan beberapa faktor penyebab yang menjadi catatan di Tahun 2023 untuk meningkatkan pencapaian nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2021-2024 telah melakukan berbagai program crosscutting/collaborative merupakan salah satu upaya dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan terutamanya Bappeda dan Dinas Pendidikan. Inisiasi crosscutting muncul dari pihak eksternal yang memiliki kepedulian bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya terutama melalui implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Pada tahun 2023 BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa program crosscutting/collaborative seperti yang tertuang dalam Laporan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
2. BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun matriks hasil capaian tahun sebelumnya terhadap target yang sudah ditetapkan, dari uraian matrik hasil dapat menggambarkan

keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai dan tertuang dalam laporan kinerja tahun 2023.

3. BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan analisis kebutuhan dalam penataan pegawai internal organisasi. Analisis yang sudah dilakukan selanjutnya menjadi dasar atau pertimbangan dalam melakukan mutasi pegawai.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 terjadi peningkatan pada nilai akuntabilitas kinerja 2024 dengan beberapa catatan di komponen pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilampirkan dokumen kepegawaian antara lain analisis beban kinerja pegawai, dokumen peta jabatan, rencana bangkom pegawai, data penyesuaian dan perpindahan jabatan dan SK Tim kerja 2024, namun belum dilampirkan matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai.
- b. Notulen belum menginformasikan hasil evaluasi periode sebelumnya dan masukan dari peserta rapat terkait perbaikan kinerja, dan belum mencantumkan hasil pendampingan dengan biro perencanaan.
- c. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindak lanjuti, namun hasil tindak lanjut berupa matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai belum dilampirkan

Berdasarkan catatan terhadap komponen perencanaan dan pengukuran di atas maka dikeluarkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Agar konsisten dalam perencanaan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi dalam implementasi perencanaan terhadap dinamika peningkatan pencapaian kinerja lembaga yang dinamis.
- b. Agar hasil tindaklanjut berupa matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai dilampirkan pengukuran kinerja.
- c. Agar konsiten dalam pelaporan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan penyajian informasi kinerja pada dokumen laporan kinerja lembaga.
- d. Agar melengkapi Notulen yang menginformasikan hasil evaluasi periode sebelumnya dan masukan dari peserta rapat terkait perbaikan kinerja, serta mencantumkan hasil pendampingan dengan biro perencanaan.

- e. Agar melampirkan matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai belum dilampirkan

Sehubungan dengan beberapa rekomendasi di atas maka BPMP Provinsi Sumatera Selatan segera menindaklanjuti, ini ditandai dengan tindak lanjut catatan dan rekomendasi melampirkan matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai, melampirkan notulen evaluasi internal yang memasukkan usulan peserta terkait dengan perbaikan kinerja dan hasil pendampingan dengan biro perencanaan, sehingga konsiten dalam perencanaan kinerja dan penyesuaian strategi dalam implementasi perencanaan terhadap dinamika peningkatan pencapaian kinerja lembaga yang dinamis agar menggambarkan keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai sudah disajikan dalam laporan kinerja tahun 2024 ini, dan untuk point a, b dan c akan ditindaklanjuti pada Triwulan I di Tahun 2025.



IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera

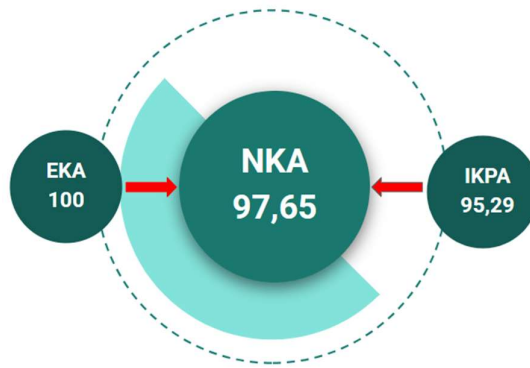
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Target, Realisasi dan Capaian

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah kinerja anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah “97,65” diperoleh dari:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$



**Gambar 3.9 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024**

Target Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 dengan target renstra 83 dan realisasi 97,54 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 117,52% dan pada tahun 2023 dengan target sebesar 84 dan realisasi 93,49 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 111,30%, sehingga pada tahun 2022 dan 2023 telah melampaui target renstra.

Pada tahun 2024 realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebesar 97,65 melampaui target kinerja tahun berjalan dan target kinerja akhir renstra yang telah dilakukan penyesuaian yaitu sebesar 94.



**Gambar 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2022-2024**

BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, dimana semua kegiatan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, serta memperkuat tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang bermuara pada peningkatan capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT Kemendikbudristek terus meningkatkan pelayanan prima dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM serta sarana dan prasarana BPMP Provinsi Sumatera Selatan.



B. Capaian Anggaran

B.1 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp34.258.979.000 dan blokir anggaran sebesar Rp 1.248.569.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan Rp32.428.780.589 dengan persentase daya serap sebesar 98,40%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, melalui 4 (empat) Rincian Output (RO) dengan rincian penyerapan anggaran berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

URAIAN	TOTAL				BLOKIR
	PAGU	REALISASI	%	SISA	
BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Rp34.258.979.000	Rp32.428.780.589	98,40 %	Rp527.629.411	Rp1.248.569.000
(6397.QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp12.720.272.000	Rp12.613.650.583	99,16 %	Rp106.621.417	
(2005.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp18.320.874.000	Rp17.900.631.841	97,71 %	Rp420.242.159	
(2005.EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp1.969.264.000	Rp1.968.498.165	99,96 %	Rp765.835	

B. 2 Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 98,40%, atau Rp32.482.780.589 dengan capaian output sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,6% senilai Rp548.143.664 dengan Rp 1.248.569.000 blokir AA, maka terdapat nilai efisiensi anggaran. Adapun rumus untuk menghitung nilai efisiensi anggaran adalah sebagai berikut.

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi}/20) \times 50$$

Berdasarkan rumus di atas, maka pada tahun 2024 diperoleh persentase nilai efisiensi anggaran sebesar 54%.

Ketercapaian target indikator kinerja kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan mengalami tren meningkat dan melampaui target, dengan nilai efisiensi mencapai 54% dapat dilihat dari faktor sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran dengan optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan paket *meeting*
2. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi/advokasi/ pendampingan secara daring
3. Identifikasi pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan mekanisme pelaksanaan secara luring dan daring.
4. melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan dengan penambahan volume output kegiatan, antara lain:
 - a. menambah sasaran kegiatan
 - b. Inisiasi penambahan sub komponen pendukung pada program prioritas dan dukungan manajemen.

C. Kinerja Lain-lain

C.1 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan Tata Kelola Organisasi

- Digitalisasi Proses Kerja: Mengimplementasikan penggunaan aplikasi dan sistem informasi dalam manajemen administrasi dan layanan.
 - Penguatan Manajemen Risiko: Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akuntabel.
 - Penyusunan SOP yang Efektif: Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Optimalisasi Layanan Terpadu: Mengembangkan layanan publik terpadu agar lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan pendidikan.
 - Survei Kepuasan Masyarakat: Melaksanakan survei untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan membuat tindak lanjut perbaikan.
 - Peningkatan Pelayanan Prima: Mengadakan pelatihan pelayanan prima untuk petugas front office, satpam, dan bagian administrasi
- c. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi
- Sosialisasi Anti-Korupsi: Mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk membangun budaya anti-korupsi di lingkungan BPMP.
 - Pembentukan Agen Perubahan: Menunjuk dan membina agen perubahan sebagai teladan dalam implementasi integritas dan reformasi birokrasi.
 - Penerapan Whistleblowing System: Memberikan sarana bagi pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman.
- d. Penguatan SDM dan Kompetensi Pegawai
- Pelatihan Berbasis Kompetensi: Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - Pengembangan Budaya Kerja ASN: Menginternalisasi nilai-nilai BERAHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Laporan Kinerja Berkala: Menyusun laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
 - Monitoring dan Evaluasi (Monev): Melakukan monev rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan efektivitas.
- f. Kolaborasi dan Kemitraan
- Sinergi dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan Dinas Pendidikan, sekolah, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan program prioritas.

- Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

C.2 Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang Mendukung

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja yaitu:

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Peserta Didik dalam Pencegahan Kekerasan
- Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- Kegiatan Satuan Tugas Penanganan Stunting Provinsi Sumatera Selatan.

C.3 Inovasi

Dalam era perubahan yang serba cepat dan dinamis seperti saat ini, inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan. Inovasi hadir sebagai solusi kreatif untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul di berbagai bidang, baik dalam pendidikan, teknologi, pelayanan publik, maupun kehidupan sosial. Melalui inovasi, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi proses, dan hasil yang lebih optimal.

Inovasi lahir dari pemikiran yang berani untuk keluar dari zona nyaman dan menciptakan perubahan positif. Inovasi tidak selalu tentang menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bagaimana kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan dampak yang lebih besar dan bermakna. Dengan semangat inovasi, kita didorong untuk terus belajar, beradaptasi, dan merancang strategi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Pada tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan inovasi yang fokus kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pendampingan serta advokasi kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan:

1. Penandatanganan Konsensus dengan Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan

Penandatanganan konsensus menjadi forum untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah serta membentuk kesepakatan bersama terhadap langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan program peningkatan mutu pendidikan.

Tujuan dari penandatanganan konsensus ini adalah untuk:

- Mendiskusikan kendala dan tantangan setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah kerjanya.

- b. Melakukan review terhadap seluruh hasil identifikasi dan kondisi mutu pendidikan di setiap pemerintah daerah.
- c. Mengidentifikasi dan mengeskalasi isu-isu yang memerlukan penanganan cepat dan memerlukan kerja sama lintas bidang/lintas instansi.
- d. Memastikan koordinasi yang baik antar instansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta peran masing-masing.
- e. Menyelaraskan program peningkatan mutu pendidikan lintas instansi.
- f. Membentuk kesepakatan bersama terhadap langkah-langkah strategis dan penyelarasan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah dan menyinergikan upaya-upaya bersama dalam peningkatan mutu pendidikan.



2. Patin (Rapat Rutin)

Rapat Rutin menjadi forum untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu yang memerlukan penanganan cepat, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis yang tepat waktu. Dalam rapat ini, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan memimpin langsung diskusi untuk memastikan seluruh peserta memahami dan berkomitmen terhadap setiap keputusan yang diambil. Kegiatan Rapat Rutin dilakukan secara luring, daring, dan hybrid, sehingga memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan partisipasi penuh dari seluruh pegawai, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Tujuan dari Rapat Rutin ini adalah untuk:

- a. Mendiskusikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu berjalan.
- b. Melakukan review terhadap kegiatan yang telah dijalankan.
- c. Mengidentifikasi dan mengeskalasi isu-isu yang memerlukan penanganan cepat.
- d. Memastikan koordinasi yang baik antar bagian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Selain itu Rapat Rutin ini menjadi momen kumpul bersama antar Tim Kerja dan Sub Bagian Umum dan Kepala BPMP untuk melakukan:

- a. Perencanaan Kegiatan: Setiap bagian di BPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat memaparkan rencana kegiatan mereka untuk minggu berjalan, sehingga semua pegawai memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dicapai.

- b. Review dan Evaluasi: Dengan melakukan review terhadap kegiatan yang telah dijalankan, setiap bagian dapat mengidentifikasi keberhasilan serta kendala yang dihadapi, dan belajar dari pengalaman tersebut untuk perbaikan di masa mendatang.
- c. Eskalasi Isu: membahas isu-isu yang muncul dan memerlukan penanganan cepat dapat diidentifikasi dan diatasi dengan segera, melalui koordinasi yang baik dan pengambilan keputusan yang cepat.
- d. Koordinasi dan Kolaborasi: Rapat ini memungkinkan terjalinnya komunikasi yang baik antar bagian, sehingga dapat tercipta sinergi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.



3. Senin BERPIJAR (Bersemangat Pagi Belajar)

Senin BERPIJAR adalah sebuah forum rutin yang diadakan setiap dua minggu sekali pada hari Senin. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pengimbasan pelatihan, sosialisasi kebijakan, serta penyampaian informasi kelembagaan dan isu-isu penting lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan Merdeka Belajar, serta terlibat aktif dalam diskusi dan pengembangan kapasitas profesional.

Selain itu, Senin BERPIJAR juga bertujuan untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pegawai, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Melalui berbagai sesi sosialisasi, diskusi, dan pelatihan, peserta akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diaplikasikan dalam praktik pendidikan sehari-hari, dengan harapan akan ada beberapa capaian yaitu:

- a. Tersampaikan informasi kelembagaan yang perlu diketahui oleh seluruh staf dan tenaga kependidikan.
- b. Adanya penguatan kapasitas dan sosialisasi terkait berbagai topik yang dibutuhkan pegawai atau lembaga.
- c. Adanya penguatan terkait *attitude, skill, and performance* pegawai.



4. BESANJO (Bersilaturahmi Antarjabatan dalam Organisasi)

Kegiatan BESANJO (Bersilaturahmi Antarjabatan dalam Organisasi) diinisiasi sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan. BESANJO memberikan ruang bagi seluruh pegawai, mulai dari staf hingga pimpinan, untuk berkumpul dalam suasana kasual dan informal. Dalam forum ini, mereka dapat berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari capaian program, tantangan yang dihadapi, praktik baik, hingga kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek.

Melalui BESANJO, diharapkan tercipta komunikasi yang lebih terbuka dan transparan di antara pegawai. Diskusi tentang capaian program dan tantangan yang dihadapi memungkinkan setiap individu untuk berbagi pengalaman dan solusi yang dapat diterapkan secara kolektif. Selain itu, praktik baik yang dibahas dalam kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi bagian lain dalam meningkatkan efektivitas kerja mereka.

BESANJO juga berperan penting dalam membangun dan memperkuat ikatan kekeluargaan di antara pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Dengan suasana yang kasual dan tidak formal, pegawai dapat berinteraksi tanpa sekat jabatan, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan saling pengertian. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Selain itu, BESANJO juga menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antar bagian. Dengan memahami tantangan dan kebutuhan masing-masing bagian, pegawai dapat bekerja sama lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Kolaborasi yang kuat ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keseluruhan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

BESANJO dilakukan secara spontan dengan setting kasual di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

- a. Pertemuan santai dengan agenda yang fleksibel.
- b. Diskusi ringan tentang berbagai topik terkait pekerjaan dan kebijakan pendidikan.
- c. Sesi berbagi pengalaman tentang praktik baik dan solusi atas tantangan yang dihadapi.
- d. Kegiatan-kegiatan interaktif untuk memperkuat hubungan antar pegawai.

Diharapkan dari kegiatan BESANJO dapat berdampak kepada:

- a. Meningkatkan hubungan dan silaturahmi antar pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Memfasilitasi diskusi informal terkait capaian program, tantangan, praktik baik, dan kebijakan Kemendikbudristek.
- c. Memperkuat kolaborasi dan kerja sama antar bagian di lingkungan BPMP.
- d. Menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan kekeluargaan.



5. Serasan (Sarasehan, Eksplorasi, Apresiasi, dan refleksi santai)

Serasan merupakan akronim dari Sarasehan, Eksplorasi, apResiAsi, dan reflekSi sANTai, Serasan menjadi inisiasi pendekatan advokasi dalam memastikan implementasi Program Merdeka Belajar oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Serasan menjadi forum untuk berdialog, berdiskusi dan mengidentifikasi praktik baik, keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Program Merdeka Belajar, serta refleksi dengan pendekatan yang cair dalam prosesnya.

Strategi advokasi “Serasan” juga berfungsi sebagai media untuk memberikan apresiasi terhadap berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan dan target objektif implementasi Merdeka Belajar. Dengan mengakui

dan menghargai upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan, diharapkan tumbuh motivasi dan semangat yang lebih tinggi untuk terus mendukung implementasi program Merdeka Belajar.

a. Tujuan kegiatan Advokasi ‘Serasan’ yaitu:

- 1) Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi
Membangun kerjasama yang lebih erat antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas pendidikan, sekolah, guru, dan komunitas pendidikan, dalam upaya memperkuat pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar.
- 2) Mengidentifikasi Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
Mengumpulkan masukan langsung dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di lapangan.
- 3) Mengeksplorasi Praktik-Praktik Inovatif dan Solusi Efektif yang telah dilakukan Pemerintah Daerah/Satuan Pendidikan
Menggali dan mendokumentasikan berbagai praktik inovatif dan solusi yang telah diterapkan oleh sekolah, guru, dan satuan pendidikan lain dalam mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar.
- 4) Memberikan Apresiasi terhadap Praktik-Praktik Baik
Mengakui dan menghargai upaya dan inovasi yang telah dilakukan oleh para peserta dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong replikasi praktik baik di berbagai konteks pendidikan.
- 5) Mendorong Refleksi dan Pembelajaran Berkelanjutan
Mengajak peserta untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik-praktik dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut.
- 6) Menyusun Rekomendasi Kebijakan yang Berbasis Data
Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan data dan masukan yang diperoleh selama kegiatan, untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di masa depan.
- 7) Memperkuat Kepercayaan dan Rasa Memiliki Terhadap Kebijakan
Meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki (*ownership*) di kalangan pemangku kepentingan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar, dengan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan

b. Manfaat yang diharapkan

- 1) Teridentifikasi dan Terdokumentasinya Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
Terdokumentasinya tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di lapangan.
- 2) Terdokumentasinya Praktik-Praktik Inovatif dan Solusi Efektif
Terdokumentasikannya berbagai praktik inovatif dan solusi yang telah diterapkan oleh sekolah, guru, dan satuan pendidikan lain dalam mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar.
- 3) Meningkatnya Sinergi dan Kolaborasi
Terbangunnya kerjasama yang lebih erat antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas pendidikan, sekolah, guru, dan komunitas pendidikan, dalam upaya memperkuat pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar.
- 4) Adanya Apresiasi terhadap Praktik-Praktik Baik
Adanya apresiasi terhadap upaya dan inovasi yang telah dilakukan oleh para peserta dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong replikasi praktik baik di berbagai konteks pendidikan.
- 5) Adanya Refleksi dan Pembelajaran Berkelanjutan
Peserta melakukan refleksi mendalam terhadap praktik-praktik dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut.
- 6) Adanya Rekomendasi Kebijakan yang Berbasis Data
Ada rekomendasi kebijakan yang berdasarkan data dan masukan yang diperoleh selama kegiatan, untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di masa depan.
- 7) Mempertegas Kepercayaan dan Rasa Memiliki Terhadap Kebijakan
Meningkatnya kepercayaan dan rasa memiliki (ownership) di kalangan pemangku kepentingan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar, dengan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.



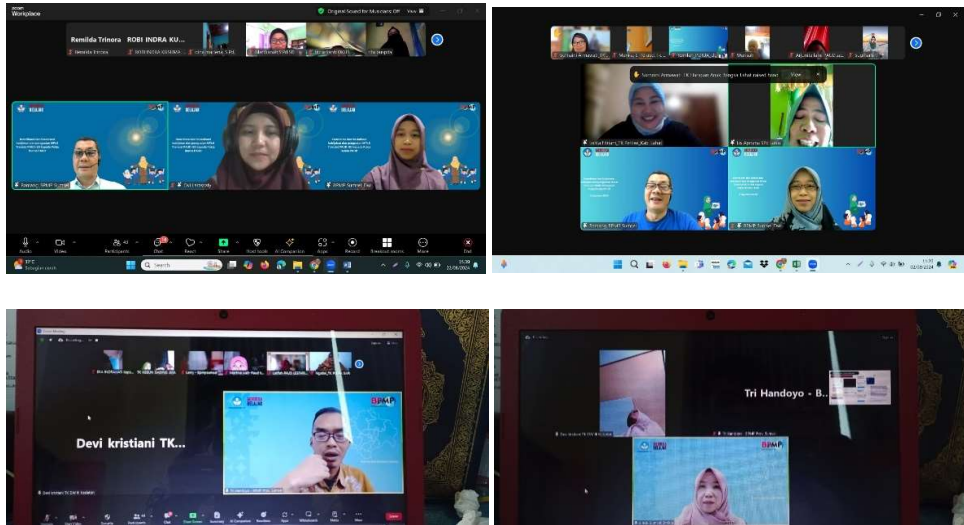
6. Pikat Bidar (Pendampingan Melekat Bimbingan Dalam Jaringan)

Kebijakan Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan langkah strategis untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia agar lebih fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Sejalan dengan visi tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan ini diimplementasikan dengan efektif di tingkat daerah.

Pendampingan melekat merupakan salah satu upaya untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan. Melalui pendekatan ini, BPMP mendampingi pemangku kepentingan secara langsung dan berkelanjutan, termasuk dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan, solusi, dan advokasi sehingga kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal.

Kegiatan pendampingan melekat ini dirancang untuk:

- a. Membangun Pemahaman dengan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip, tujuan, dan mekanisme Kebijakan Merdeka Belajar.
- b. Memberikan Dukungan Teknis dengan membantu pemangku kepentingan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata di lapangan.
- c. Mengawal Pelaksanaan dengan melakukan identifikasi tantangan dan hambatan di lapangan serta memberikan rekomendasi solutif secara cepat dan tepat.
- d. Mendorong Kolaborasi dengan memperkuat sinergi antara BPMP, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar.



7. Komunitas Belajar CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik)

Dalam rangka mendorong transformasi UPT, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah KOMUNITAS BELAJAR CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik) yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar Staf Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Komunitas belajar merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang interaktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dalam komunitas belajar, seluruh anggota tim kerja dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan secara keseluruhan. Panduan ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KOMUNITAS BELAJAR CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik), hal ini karena dalam era transformasi digital dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, maka pengetahuan memiliki peran sentral dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten agar siap menghadapi tantangan global.

Dalam praktiknya, komunitas belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kelompok diskusi, forum daring, program mentoring di mana anggota secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran.

Komunitas ini memiliki fasilitator atau koordinator yang membantu memandu diskusi, menyediakan sumber daya, dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai.

Ciri dari kegiatan komunitas belajar meliputi:

- a. Kolaborasi: Anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama.

- b. Berbagi Pengetahuan: Anggota berbagi pengalaman, informasi, dan pemahaman untuk saling mendukung.
- c. Diskusi Terbuka: Ada ruang untuk berdiskusi secara terbuka, menghargai pendapat, dan memberikan umpan balik konstruktif.
- d. Pembelajaran Berkelanjutan: Proses pembelajaran tidak berakhir pada satu sesi, melainkan terus berkembang seiring waktu.

Manfaat Komunitas Belajar CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik) adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Menjadi media dalam berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- c. Menciptakan individu yang gemar belajar sepanjang hayat.
- d. Menciptakan SDM yang memiliki inovasi dan kreatifitas.
- e. Menciptakan kolaborasi SDM dalam lingkup internal dan eksternal.
- f. Membentuk SDM yang dapat menemukan solusi untuk setiap masalah (problem solver)

Melalui Komunitas Belajar CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik) dapat dilakukan pengembangan kompetensi SDM Balai Penjaminan Mutu Pendidikan untuk menguatkan:

- a. Product Knowledge KMB sesuai isu yang berkembang;
- b. Pengetahuan tentang strategi dan metode advokasi;
- c. Kolaborasi dengan anggota lain;
- d. Capacity building personel Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.



8. Juker (Jumat Kelakar)

Jumat Kelakar (Juker) merupakan wahana belajar yang dirancang khusus untuk pegawai dengan pendekatan Andragogi, Experiential Learning, Participatory Learning yang kasual dan menyenangkan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan sikap dan kompetensi yang relevan dengan dunia pendidikan. Jumat Kelakar tidak hanya sekadar program skill, knowledge, dan attitude tetapi juga menjadi sarana untuk membangun profesionalisme dan ikatan kekeluargaan yang lebih kuat di antara pegawai melalui berbagai aktivitas bermain dan belajar yang menyenangkan. Dengan melibatkan narasumber yang berkompeten dan materi yang relevan, Jumat Kelakar berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif bagi seluruh peserta.

Tujuan dari Jumat Kelakar (Juker):

- Meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai di berbagai aspek pendidikan.
- Membangun sikap positif dan proaktif dalam lingkungan kerja.
- Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif.
- Mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara pegawai

Hasil yang diharapkan:

- Meningkatnya keterampilan dan kompetensi pegawai di berbagai aspek pendidikan.
- Terbangunnya sikap positif dan proaktif dalam lingkungan kerja.
- Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif.
- Mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara pegawai



9. Dashboard Analisis Tematik Anomali Dapodik

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) merupakan sistem pendataan pendidikan nasional yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Keakuratan data DAPODIK sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program pemerintah. Namun, seringkali terdapat anomali data dalam DAPODIK yang dapat

mempengaruhi kualitas kebijakan pendidikan, seperti ketidaksesuaian data siswa, guru, atau sarana prasarana.

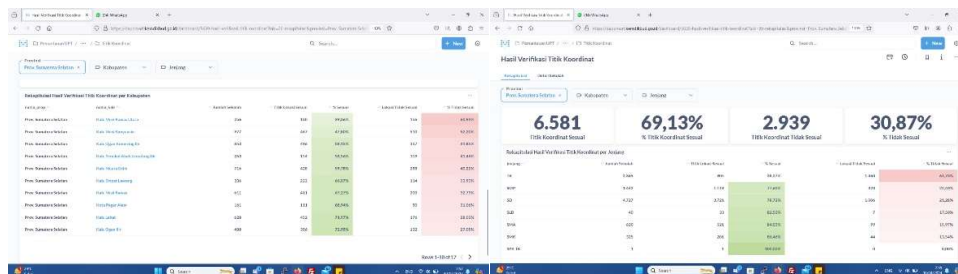
Untuk mengatasi hal ini, kegiatan Analisis Data Anomali diperlukan agar anomali dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pendampingan terhadap dinas pendidikan, dan stakeholder terkait menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan DAPODIK bebas dari anomali, untuk mempermudah agar dinas pendidikan dapat melakukan validasi secara mandiri masing-masing dinas kabupaten/kota di buat dashboard dan akun masing-masing

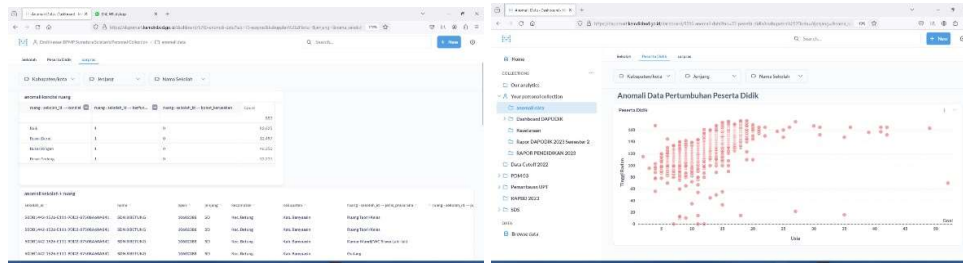
Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi jenis-jenis anomali data dalam DAPODIK.
- Menganalisis penyebab munculnya anomali data.
- Memberikan solusi perbaikan untuk mengatasi anomali data.
- Meningkatkan kapasitas operator dalam menjaga kualitas data DAPODIK.
- Memastikan data pendidikan yang akurat dan valid untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar.

Dari kegiatan ini mempunyai manfaat:

- Meningkatkan Keakuratan Data Pendidikan
- Mendukung Kebijakan yang Tepat Sasaran
- Mengurangi Resiko Kesalahan Administrasi
- Meningkatkan Efisiensi Pendataan
- Memudahkan Proses Verifikasi dan Validasi Data
- Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas
- Mencegah Potensi Penyalahgunaan Data
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan
- Mengidentifikasi Tantangan di Lapangan
- Mendukung Program Merdeka Belajar





C.4 Penghargaan

Pada tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Peringkat I laporan pertanggungjawaban Bendahara Kategori Pagu besar se- Sumatera Selatan dari KPPN Palembang



2. Dukungan pada Pembuatan Konten Edukatif dari IGI Kabupaten Ogan Ilir



3. Apresiasi Duta Merdeka Belajar Kategori Dampak Advokasi dan Fasilitas Kelompok UPT Inspiratif dari Kemendikbudristek Tanggal 03 Oktober 2023.



4. Mendukung Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir



C.5 Program Crosscutting/Collaborative

Program *crosscutting/collaborative* merupakan salah satu upaya dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui sinergi dan kolaborasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan terutamanya Bappeda dan Dinas Pendidikan. Inisiasi *crosscutting* muncul dari pihak eksternal yang memiliki kepedulian bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya terutama melalui implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.

Pada tahun 2024 BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa program *crosscutting/collaborative* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Program Crosscutting/Collaborative BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Kab. Banyuasin	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2024	10 September 2024	Hotel Emilia Palembang

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Evaluasi dan Verifikasi Dapodik Semester 1 Jenjang SMP Tahun 2024	13 s.d. 14 September 2024	Hotel Emilia Palembang
		Bimtek Pengelolaan PAUD melalui Pengembangan Karir PTK pada Satuan Pendidikan PAUD	2 s.d. 4 Desember 2024	Hotel Grand Duta Palembang
2	Kab. Empat Lawang	Pengembangan Kurikulum Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan PNF (Penguatan Rapor Pendidikan)	26 Oktober 2024	
3	Kab. Lahat	Perencanaan Berbasis Data	28 Februari 2024	Lahat
		Sosialisasi dan Komitmen bersama pj Bupati Lahat dengan Stakeholder terkait untuk Penuntasan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	07 Oktober 2024	Hotel Orcid Lahat
		Sosialisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Anak Usia Dini	8 November 2024	Hotel Callista Lahat
		Workshop Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	29 November 2024	Hotel Bukit Serelo Lahat
		Pendampingan Dapodik PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	2 Desember 2024	Hotel Orchid Lahat
4	Kab. Muara Enim	Bimtek Pengelolaan BOS Tingkat SMP/MTs Kab.Muara Enim	Mei 2024	Ballroom Hotel Griya Serasan Muara Enim
		Bimtek Penguatan Karakter di SMP tahun Anggaran 2024	Juni 2024	Ballroom Hotel Griya Serasan Muara Enim
		Bimtek Pengelolaan Dana BOSP SD	1 s.d. 12 September 2024	Muara Enim
		Bimtek Pengelolaan Dana BOS Tingkat SD - Rapor Pendidikan - EDS, RKJM, dan RKT - Penganggaran pada ARKAS - Penatausahaan Dana BOS pada ARKAS	1, 4, 7, 10 September 2024	Muara Enim
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Arkas/Markas BOP Kesetaraan Se-Kabupaten Muara Enim tahun Anggaran 2024	September 2024	Ballroom Hotel Griya Serasan Muara Enim

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Workshop Literasi dan Numerasi	10 s.d. 11 Oktober 2024	Gedung SKB Kab. Muara Enim
		Bimtek Model Pembelajaran pada PAUD tentang Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Holistik Integratif	18 s.d. 20 Oktober 2024	Griya Serasan Sekundang Kab. Muara Enim
		Workshop Peningkatan Mutu melalui Pembelajaran Literasi Numerasi dan Optimalisasi Ice Breaking dalam Pembelajaran yang Menyenangkan	2 s.d. 3 Desember 2024	SDN 5 Lawang Kidul
		Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Disdikbud Kab. Muara Enim dengan SEAMEO CECCEP	6 Desember 2024	Hotel Griya Sintesa
5	Kab. Musi Banyuasin	Kualitas Pengelolaan Dapodik dalam Perencanaan Berbasis Data dan Peningkatan Raport Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan dalam Kab. Musi Banyuasin	Februari - Maret 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
		Bimtek Peningkatan Kapasitas PAUD HI Tahun 2024	20 Agustus 2024	SMPN 6 Unggul Sekayu
		Pengimbasan Advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka Pendidikan Kesetaraan melalui Dana BOSP Kinerja	21 s.d. 22 September 2024	Hotel Permata Randik Sekayu
		Program Sekolah Penggerak Kab. Musi Banyuasin	25 s.d. 27 September 2024	Gambo Hotel & Residence Sekayu
		Pelatihan bagi Tutor Kesetaraan Tahun 2024	24 Oktober 2024	Gedung PBG Disdikbud Kab. Musi Banyuasin
6	Kab. Musi Rawas	Meningkatnya Persentase Satuan Pendidikan (PAUD) yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya	19 s.d. 20 September 2024	Kab.Musi Rawas
		Pengelolaan Dana BOS	2 Desember 2024	Sampoerna Hotel Lubuklinggau
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Jenjang SMP Negeri dan Swasta	2 Desember 2024	
7	Kab. Musi Rawas Utara			
8	Kab. Ogan Ilir	Bimtek Rapor Pendidikan dan PBD SMP	24 s.d. 26 April 2025	Hotel Emilia Palembang

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Bimtek Rapor Pendidikan dan PBD SD	13 s.d. 15 Mei 2024	Ogan Ilir
		Pelatihan Tenaga Administrasi Sekolah SMP	26 s.d. 28 Agustus 2024	Hotel Emilia Palembang
		Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Tim Fasilitator Proyek P5	10 s.d. 12 September 2024	Hotel Sintesa Peninsula Palembang
		Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan/Nonformal tahun 2024	30 September s.d. 02 Oktober 2024	Hotel Emilia Palembang
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Bimtek Operator)	7 s.d. 9 Oktober 2024	Hotel Emilia Palembang
		Bimtek Rapor Pendidikan dan PBD PAUD	21 s.d. 23 Oktober 2024	Ogan Ilir
9	Kab. Ogan Komering Ilir			
10	Kab. Ogan Komering Ulu	Sosialisasi Asesmen Nasional, Sulingjar Perencanaan Berbasis Data Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2024	31 Juli 2024	Gedung Aula SKB Baturaja
		Sosialisasi ARKAS	12 September 2024	Hotel Bukit Indah Lestari Baturaja
		Rakor Percepatan Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS)	24 September 2024	Grand Jati I Ballroom Bill Hotel
11	Kab. OKU Selatan	Peningkatan Kompetensi Guru	19 s.d. 21 September 2024	Graha Serasan Seandanan Banding Agung
		Pendampingan dalam Pengembangan Komunitas Belajar Literasi/Numerasi di SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu	30 September s.d. 01 Oktober 2024	Aula SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu
		Bimtek Penggunaan Dana BOSP	1 s.d. 3 November 2024	Gedung Guru Muaradua
		Sosialisasi Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	18 November 2024	Gedung Guru Muaradua
12	Kab. OKU Timur	Juknis Pengelolaan BOSP tahun 2024	27 s.d. 29 Februari 2024	BPP Pertanian Sumsel
		Bimtek Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada satuan PAUD Kab. OKU Timur	14 s.d. 16 Agustus 2024	Penginapan Helena, Belitang

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan Menuju PAUD Berkualitas	24 s.d. 26 September 2024	Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Sumatera Selatan
		Pelatihan Implementasi P5 Tema Kebekerjaan	7 s.d. 9 November 2024	SMK Muhammadiyah Belitang
		Optimalisasi Akses Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusi	14 November 2024	Hotel Ardan, Belitang
		Rapat Koordinasi Hasil Advokasi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Percepatan Peningkatan Akses Pendidikan melalui Penuntasan ATS	05 Desember 2024	Aula Bina Praja II, Pemkab OKU Timur
13	Kab. PALI	Bimtek Perencanaan Penatausahaan dan Pelaporan Dana BOS pada Satpen Jenjang SD/SMPN/Swasta se Kabupaten PALI	20 s.d. 21 November 2024	Pendopoan Guest House Rumah Dinas Bupati PALI
14	Kota Lubuklinggau	Sosialisasi Kesiapan Bersekolah (Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan)	5 Agustus 2024	Hotel Cozy Lubuklinggau
15	Kota Pagar Alam	Sosialisasi Aplikasi Keuangan ARKAS Tingkat SD/SMP di Kota Pagar Alam	4 s.d. 5 Maret 2024	Favour Waterfun & Resort
		Bimtek bagi Guru SMP Negeri 1 Pagar Alam	6,8, dan 9 Juli 2024	SMPN 1 Pagar Alam
		Bimtek IKM Tingkat SD dan SMP	11 s.d. 13 September 2024	Hotel Favour Pagar Agung Pagar Alam
		Bimtek Kurikulum PAUD	12 s.d. 14 September 2024	Aula SPNF SKB Kota Pagar Alam
16	Kota Palembang	Rakor dan Sinkronisasi Data Dapodik di Satuan Pendidikan PAUD	22 Februari 2024	Hotel Harper Palembang
		Sosialisasi Pendampingan Pendidikan Layanan Khusus bagi Satuan Pendidikan SD se-Kota Palembang	22 Februari 2024	Hotel Grand Daira Palembang
		Workshop Rapor PBD Kesetaraan Kota Palembang	06 Maret 2024	Hotel The Zuri Palembang
		Peningkatan Kompetensi Guru untuk Menjadi Guru Pembimbing Khusus	22 s.d. 24 April 2024	Hotel Sintesa Peninsula Palembang
		Bimtek Tata Cara Penilaian Kondisi Fisik Bangunan SMP Negeri/Swasta Kota Palembang TA 2024	25 s.d. 26 April 2024	Grand Daira Hotel Palembang

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Pengembangan Konten Digital Untuk PAUD Dalam Mengunggah Aksi Nyata Pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) Tahun 2024	Gelombang 1: 3 Juni 2024 Gelombang 2: 4 Juni 2024	Hotel Alts Palembang
		Bimtek Penyusunan Modul Ajar bagi Komite Pembelajaran dan Komunitas Belajar SD Kota Palembang	15 Agustus 2024	Hotel Salatin Palembang
		Bimtek Kampanye Sekolah Sehat Tingkat SMP Negeri dan Swasta Tahun 2024	20 s.d. 21 Agustus 2024	Hotel Salatin Palembang
		Evaluasi Dapodik Sarpras dari Satpen Sesuai Kondisi Terkini	26 Agustus 2024	Hotel Salatin Palembang
		Pembinaan TIK untuk Pendidikan melalui PBD Jenjang SMP		Palembang
		Sosialisasi Wajib PAUD Anak Usia 5-6 Tahun bagi Masyarakat Kota Palembang Tahun 2024	24 s.d. 27 September 2024	Gedung Convention Atyasa Center Palembang
		Bimtek PAUD di Palembang	1 Oktober 2024	Palembang
		Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan untuk Meningkatkan Kapasitas Pendidik PAUD tahun Anggaran 2024	01 s.d. 02 Oktober 2024	The Alts Hotel Palembang
		Sosialisasi Makna Kesaktian Pancasila	10 Oktober 2024	Aula Lantai 3 Disdik Palembang
		Sosialisasi Pengelolaan BOSP tahun 2025 di Satpen SMPN/Swasta	11 s.d. 12 November 2024	Aula Lantai 3 Disdik Palembang
		Workshop Literasi Numerasi	12 s.d. 13 November 2024	SMK Negeri 5 Palembang
		Seminar Hari Guru Nasional	25 November 2024	Aula Lt. III Disdik Kota Palembang
		Sosialisasi Perundang-undangan tentang PPDB Jenjang TK/SD/SMP Negeri/Swasta	5 Desember 2024	Kebon Gede Venue Palembang
17	Kota Prabumulih	Workshop Uji Kesetaraan Disdik Kota Prabumulih	07 Maret 2024	Hotel Grand Nikita Prabumulih
		Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan SD	16 s.d. 17 Juli 2024	Prabumulih

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Bimtek Penyusunan ARKAS dan Pelaporan BOP PAUD	17 Juli 2024	Fave Hotel Prabumulih
		Pelatihan Proktor ANBK	27 Agustus 2024	Hotel Grand Nikita Prabumulih
		Bimtek Rapor Pendidikan dan PBD Jenjang SD dan SMP Kota Prabumulih	5 November 2024	Prabumulih
		Pelatihan Kurikulum Jenjang SMP	12 November 2024	Fave Hotel Prabumulih
		Workshop Dapodikdasmen Tahun 2024	6 s.d. 7 Desember 2024	Yayasan Ishlahul Ummah Prabumulih
		Advokasi Sekolah Ramah Anak Tingkat SD Kota Prabumulih	10 Desember 2024	Hall Ishlahul Ummah Prabumulih
		Bimtek Penilaian Kinerja LKP berbasis Dunia Kerja	17 Desember 2024	Fave Hotel Prabumulih
18	Provinsi Sumatera Selatan	Rakortekbang Nasional Urusan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	06 Maret 2024	Vasa Hotel Surabaya
		Sinkronisasi dan Akselerasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 "Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM menuju Indonesia Emas 2045"	30 April 2024	Hotel Harper Palembang
		Bimbingan Teknis dan Pra Penilaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting	13 s.d. 14 Mei 2024	Ruang Rapat Dapunta Hyang Lanyai III Bappeda Prov. Sumsel
		Sosialisasi Gerakan Transisi PAUD Ke SD Yang Menyenangkan kepada Pengurus Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Provinsi Sumatera Selatan	4 Juli 2024	Hotel Wyndham Palembang
		Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	16 Juli 2024	Aula SMKPPN Sembawa
		Lomba Cerdas Cermat (LCC) Jenjang SMK	22 s.d. 24 Juli 2024	Asrama Haji Palembang
		Pelatihan terkait Metode Pembelajaran, Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran	29 s.d. 31 Juli 2024	Aula SMA Negeri 1 Sekayu

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Bimtek Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12 s.d. 14 Agustus 2024	Hotel Swarna Dwipa Palembang
		Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan menuju PAUD Berkualitas	24 s.d. 26 September 2024	Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Sumatera Selatan
		Workshop Penguatan IKM Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tahun 2024	19 November 2024	Hotel Beston Palembang
		Sinkronisasi dan Penyelarasan Transformasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2022	28 s.d. 30 Nov 2022	Hotel Santika Palembang
		Lokakarya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim” di Sumatera Selatan	3 Desember 2024	Hotel Beston Palembang
		Peluncuran (<i>launching</i>) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	5 Desember 2024	Auditorium Graha Bina Praja
		Rakor Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga TPPS	6 Desember 2024	Ruang Rapat Dinas PPPA Prov. Sumsel
		Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Stunting (TPPS) se Sumsel	11 Desember 2024	Hotel Beston Palembang
19	Mitra (Bank Indonesia)	Pengantar P5 dan Keterkaitan dengan GSMP Awards	28 Mei 2024	Hotel The Zuri Palembang
20	Mitra (Yayasan Guru Belajar)	Temu Pendidik Nusantara	2 November 2024	Restoran Tauto Gedung Rasa Jakarta
21	Mitra (BAN)	Rakorda Tahap 2 Tahun Anggaran 2024	1 Desember 2024	Hotel The Zuri Palembang

BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan program *crosscutting/collaborative* dalam upaya mempercepat transformasi pendidikan, kolaborasi yang kuat antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan kegiatan prioritas Kemendikbudristek.

BPMP sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di daerah, memiliki peran strategis untuk mendampingi Pemda dalam memastikan setiap kebijakan dan program pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan berdampak nyata. Dengan menjalin kemitraan yang solid, BPMP dan Pemda dapat mengidentifikasi tantangan bersama, merumuskan solusi, dan merancang langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam rangka mendukung kegiatan prioritas Kemendikbudristek, kolaborasi antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Pemerintah Daerah (Pemda) melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan maupun pemangku kepentingan lainnya di luar pendidikan. Setiap pihak memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan dan program pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif.

Pihak-pihak dan terlibat dalam kegiatan *crosscutting/colaborative* antara lain:

1. BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan)
 - a. Sebagai fasilitator dan pendamping kebijakan pendidikan di daerah.
 - b. Menyediakan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi implementasi kebijakan.
 - c. Memberikan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan data dan hasil evaluasi.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - a. Mengkoordinasikan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.
 - b. Mengalokasikan sumber daya dan mendukung kebijakan nasional agar berjalan di tingkat lokal.
 - c. Menyusun rencana aksi pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Organisasi Pemerintah Daerah (Bupati, Sekda, Dukcapil, Disdik, Kemenag, Dinsos, PPPA, BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BKKBN, Pokja Bunda PAUD)
Merumuskan perencanaan strategis terkait pendidikan dan alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kemendikbudristek dan melakukan verifikasi ATS, serta Pencegahan stunting untuk mendukung SDM yang berkualitas.
4. Mitra Pembangunan
Organisasi yang mendukung pendanaan, pelatihan, dan pendampingan teknis.

Dampak dari kegiatan *crosscutting/collaborative* yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatnya Mutu Pendidikan: Adanya peningkatan hasil belajar siswa dan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
2. Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan: Memastikan seluruh anak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

3. Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan: Menekan kesenjangan antarwilayah, baik di perkotaan maupun daerah terpencil.
4. Terwujudnya Komunitas Belajar yang Aktif: Memperkuat ekosistem pendidikan melalui diskusi rutin dan refleksi bersama.

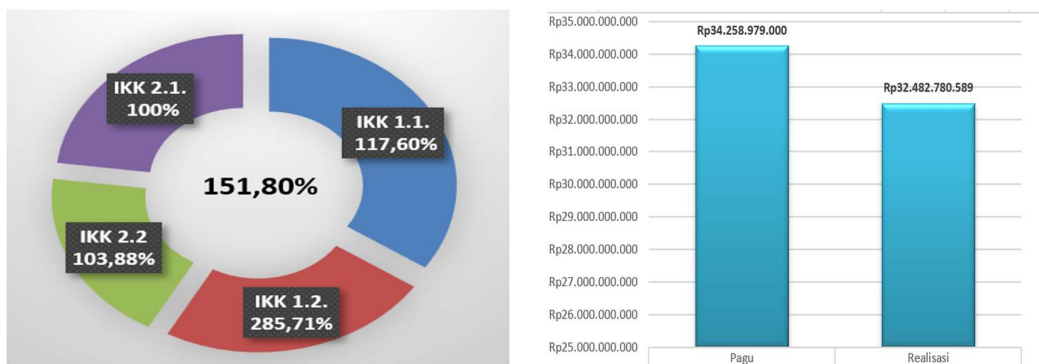


BAB IV | PENUTUP

A. Kesimpulan

BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran kegiatan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan data yang ada, pada rentang tahun 2020-2024 capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki tren yang meningkat, sementara serapan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki tren yang kurang lebih sama, *fluktuatif*.

Berdasarkan data yang diuraikan pada Bab III terkait persentase capaian kinerja fisik dan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan persentase capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 151,80% dan penyerapan anggaran sebesar 98,40%, dengan rincian sebagai berikut:



1. Persentase capaian kinerja fisik pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian:
 - ✓ IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya, capaian kinerja sebesar 117,60%;
 - ✓ IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen), capaian kinerja sebesar 285,71%.
2. Persentase capaian kinerja fisik sasaran kegiatan “Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian:

- ✓ IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja sebesar 100%;
 - ✓ IKK2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja sebesar 103,88%.
3. Persentase capaian daya serap anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 98,40% dengan pagu anggaran sebesar Rp34.258.979.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp32.482.780.589, blokir AA sebesar Rp1.248.569.000, dan sisa anggaran Rp527.629.411,-
 4. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,6% senilai Rp548.143.664 dengan persentase dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 54%.

B. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran di BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dapat diidentifikasi kendala dan tantangan sebagai berikut:

1. Kolaborasi dan sinergitas keterlibatan mitra pembangunan dan komunitas dalam Implementasi program prioritas pendidikan masih harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
2. Koordinasi dan sinergitas pelibatan pemangku kepentingan (Tata Pemerintahan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam upaya pemenuhan SPM pendidikan dan penyusunan perencanaan serta penganggaran masih perlu lebih diselaraskan dan diperkuat.
3. Advokasi program-program prioritas pada stakeholder/ekosistem pendidikan masih perlu terus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman dan capaian program.
4. Koordinasi dengan Tim PMO Transformasi Pembelajaran dan Tata Kelola Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota masih perlu diperkuat untuk mendapatkan capaian kinerja program dan kegiatan yang lebih baik di masa mendatang.
5. Strategi dan mekanisme dalam identifikasi dan inventarisasi, inovasi dan praktik baik yang dilakukan ekosistem pendidikan perlu dipetakan serta dikaji agar dapat lebih berdampak dan menjadi inspirasi bagi peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.
6. Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola administrasi satuan pendidikan yang sudah baik perlu semakin ditingkatkan dengan pelibatan dan partisipasi seluruh ekosistem pendidikan.
7. Partisipasi pemangku kepentingan dalam mengikuti pendampingan implementasi program-program prioritas melalui inovasi Pendampingan Melekat Bimbingan Dalam Jaringan (PIKAT BIDAR), dan Advokasi secara berkala dan berkelanjutan diperkuat dan ditingkatkan.
8. Perlunya lebih memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan dan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan program prioritas kementerian.

9. Masih perlu aktivitas internal lembaga bagi pegawai seperti Rapat Rutin (Patin), Senin Berpijar, dan Komunitas Belajar Cerdas Pegawai yang lebih inovatif dan konsisten sehingga menjadi budaya organisasi.
10. Penguatan budaya belajar pegawai melalui Komunitas Belajar (kombel) internal pegawai telah dilaksanakan namun masih memerlukan penguatan dan komitmen seluruh pegawai untuk konsisten melaksanakan kombel secara efektif dan membudaya agar lebih berdampak dan berkelanjutan.
11. Publikasi dan komunikasi hasil kinerja satuan kerja masih perlu diintensifkan dan diamplifikasi untuk memperluas target sasaran pada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
12. Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas wilayah Bebas Korupsi masih perlu diperkuat secara berkelanjutan, berdampak dan menjadi budaya kerja.

Langkah Kerja Ke Depan

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan optimal.

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Konsensus/kesepakatan bersama pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi dan sinergitas implementasi program prioritas.
2. Penguatan partisipasi pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan dan penyusunan perencanaan serta penganggaran peningkatan mutu pendidikan melalui penyelarasan program peningkatan mutu pendidikan.
3. Koordinasi dan sinergi dengan Tim PMO Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dan merefleksikan capaian kinerja program dan kegiatan yang lebih optimal, berdampak dan berkelanjutan di masa mendatang
4. Mengidentifikasi dan menginventarisasi strategi dan mekanisme penjangkaran inovasi dan praktik baik dengan mengedepankan kemandirian dan inisiasi dalam ekosistem pendidikan (Pemda, Dinas pendidikan, Satuan Pendidikan, PTK)
5. Optimalisasi peran mitra pembangunan/komunitas/ekosistem pendidikan untuk mewujudkan tata kelola administrasi satuan pendidikan yang lebih baik dalam mengimplementasikan program prioritas
6. Penguatan sinergi hubungan dengan media (media relationship) dalam rangka komunikasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Optimalisasi komunitas belajar internal untuk menguatkan keberhasilan transformasi sumber daya manusia (SDM) unit pelaksana teknis (UPT) satuan kerja dan kualitas capaian kinerja program prioritas agar lebih terstruktur dan terjadwal.
8. Penguatan partisipasi dan kolaborasi pegawai antar tim kerja menjadi budaya kerja.

9. Optimalisasi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dalam Penguatan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan baru tersebut maka BPMP Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan langkah kerja ke depan berikut.

1. Melakukan penyelarasan Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui penyusunan Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029
2. Melakukan identifikasiFasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
3. Memperkuat tata kelola organisasi melalui implementasi Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
4. Budaya kerja organisasi yang RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong) melalui peningkatan kapasitas SDM.
5. Agar konsisten dalam perencanaan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi dalam implementasi perencanaan terhadap dinamika peningkatan pencapaian kinerja lembaga yang dinamis.
6. Matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai dilampirkan dalam pengukuran kinerja.
7. Konsisten dalam pelaporan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan penyajian informasi kinerja pada dokumen laporan kinerja lembaga.
8. Melengkapi Notulen yang menginformasikan hasil evaluasi periode sebelumnya dan masukan dari peserta rapat terkait perbaikan kinerja, serta mencantumkan hasil pendampingan dengan biro perencanaan.
9. Melampirkan matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH



**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Indralaya, 30 Januari 2025
Ketua Tim Reviu

Ahmad Jauhari, S.Ag.M.Si
NIP197307022002121002

KERTAS KERJA

REVIU LAPORAN KINERJA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	Pernyataan	CheckList
I	Format Laporan Lakin	
1	Laporan kinerja telah menyajikan data penting unitkerja	✓
2	Laporan kinerja telah menyajikan informasi targetkinerja	✓
3	Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan Laporan	
1	Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unitkerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	✓
2	Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓
3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	✓
4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpul data/informasi di setiap unit kerja	✓
5	Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	✓
6	Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
7	Laporan Kinerja triwulan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	✓
III	Substansi laporan	
1	Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
2	Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
4	IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	✓
5	Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
6	Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	✓
7	Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja;	✓
8	Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan;	✓
9	IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran;	✓
10	IKSS/IKP/IKK telah SMART	✓



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aria Ahmad Mangunwibawa

Jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Iwan Syahril
NIP 197610262023211002



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Aria Ahmad Mangunwibawa
NIP 197511252005011002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	94

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 20.807.898.000,-
2.	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 14.574.294.000,-
Total Anggaran			Rp. 35.382.192.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aria Ahmad Mangunwibawa

Jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Indralaya, 1 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah

Iwan Syahril

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan

Aria Ahmad Mangunwibawa



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3.92
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	35
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Predikat	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	94

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp 20.290.138.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 13.968.841.000
Total Anggaran			Rp 34.258.979.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
 Dasar dan Pendidikan Menengah
 Iwan Syahril

Indralaya, 1 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Penjaminan Mutu
 Pendidikan Provinsi Sumatera
 Selatan
 Aria Ahmad Mangunwibawa



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan**

Jln. Lintas Timur Km. 36 Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir
Sumatera Selatan
Telp. (0711) 581368 Fax. (0711) 581518

